

LAPORAN KINERJA INTERIM Triwulan I

Tahun
2022



BALAI BESAR POM DI SURABAYA

Jl. Karangmenjangan No. 20 Surabaya - 60286
Telepom : 031-5020575, 5048833
email : bpom_surabaya@pom.go.id

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2022.



Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Balai Besar POM di Surabaya dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2022 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya Tahun 2020-2024, Reviu Renstra 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2022 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya pada tahun selanjutnya.

Surabaya, 20 April 2022

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes. Epid.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis triwulan I pada tahun 2022 mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024 yang terdiri dari 11 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja utama. Dari 11 sasaran strategis, hanya 6 sasaran strategis yang bisa dievaluasi, sedangkan 5 sasaran strategis lainnya baru bisa dievaluasi akhir tahun atau menunggu nilai dari Badan POM. Dari 6 sasaran strategis yang dievaluasi diperoleh 1 sasaran strategis memperoleh capaian "SANGAT BAIK", 2 sasaran strategis memperoleh capaian "BAIK", 1 sasaran strategis memperoleh capaian "KURANG", dan 2 sasaran strategis memperoleh capaian "TIDAK DAPAT DISIMPULKAN". Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 102,44% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2022
2. Belum ada capaian indikator sasaran strategis kedua pada triwulan I tahun 2022, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2022 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya
3. Belum ada capaian indikator sasaran strategis ketiga pada triwulan I tahun 2022, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2022 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya
4. Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 97,66% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya.
5. Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 68,65% dengan kriteria **KURANG**, hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih tinggi agar BBPOM di Surabaya dapat mencapai target triwulan selanjutnya dalam meningkatkan efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya
6. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 134,64% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan I dalam

meningkatkan efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya

7. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 119,05% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2022
8. Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan, hasil akan diperoleh pada triwulan I tahun 2022 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal
9. Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesembilan, hasil akan diperoleh pada triwulan I tahun 2022 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal
10. Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesepuluh, hasil akan diperoleh pada triwulan I tahun 2022 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
11. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesebelas sebesar 445,28% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan I dalam mengelola keuangan BBPOM di Surabaya secara akuntabel pada triwulan I tahun 2022.

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Surabaya pada tahun 2022 antara 35,71% sampai dengan 445,28%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya” disebabkan adanya juknis pelaksanaan kegiatan yang tidak segera turun dari pusat, sehingga kegiatan tidak bisa segera dilaksanakan. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Nilai Kinerja Anggaran UPT” sebesar 445,28%, hal ini disebabkan karena target yang terlalu rendah di triwulan I, serta adanya perubahan cara perhitungan IKPA.

Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil 2 kegiatan tidak efisien dan 20 kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,5 hingga 5,53 (Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Surabaya didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp56.083.984.000,-. Realisasi anggaran triwulan I tahun 2022 adalah Rp 7.895.838.114,- atau 14,08%.

Balai Besar POM di Surabaya berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2022.



Surabaya, 20 April 2022

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes. Epid.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. <i>Latar Belakang</i>	1
1.2. <i>Gambaran Umum Organisasi</i>	2
1.3. <i>Struktur Organisasi</i>	3
1.4. <i>Aspek Strategis Organisasi</i>	5
1.5. <i>Analisis Lingkungan Strategis</i>	6
1.6. <i>Isu Strategis</i>	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. <i>Rencana Strategis</i>	17
2.2. <i>Rencana Kerja Tahun 2022</i>	19
2.3. <i>Perjanjian Kinerja Tahun 2022</i>	20
2.4. <i>Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)</i>	22
2.5. <i>Metode Pengukuran</i>	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	185
3.1. <i>Capaian Kinerja Organisasi</i>	185
3.2. <i>Realisasi Anggaran</i>	278
3.3. <i>Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</i>	279
BAB IV. PENUTUP	281
4.1 <i>Kesimpulan</i>	281
4.2 <i>Saran</i>	283
LAMPIRAN	284

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya	3
Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya dan Loka POM	8
Gambar 3. Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa Timur	8
Gambar 4. Visi dan Misi	17
Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya	18
Gambar 6. Kriteria Pencapaian Indikator	24

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan	6
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2021 Balai Besar POM di Surabaya	19
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2022	20
Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2022	22
Tabel 5. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022	185
Tabel 6. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2022	186
Tabel 7. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat hingga triwulan I tahun 2022	188
Tabel 8. Perbandingan Realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	189
Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat hingga triwulan I tahun 2022	190
Tabel 10. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat hingga triwulan I tahun 2022	191
Tabel 11. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga triwulan I tahun 2022	192
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	193
Tabel 13. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga triwulan I tahun 2022	195
Tabel 14. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	195
Tabel 15. Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat hingga triwulan I tahun 2022	197
Tabel 16. Perbandingan Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	198
Tabel 17. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu hingga triwulan I tahun 2022	199
Tabel 18. Perbandingan Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	201
Tabel 19. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2022	205
Tabel 20. Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	206
Tabel 21. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2022	208
Tabel 22. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	209
Tabel 23. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM hingga triwulan I tahun 2022	213
Tabel 24. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	214
Tabel 25. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi	216

Tabel 26. Perbandingan realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	217
Tabel 27. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan hingga triwulan I tahun 2022	219
Tabel 28. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	220
Tabel 30. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan tepat waktu hingga triwulan I tahun 2022	221
Tabel 31. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	222
Tabel 33. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	226
Tabel 34. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	227
Tabel 36. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	229
Tabel 37. Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	230
Tabel 39. Realisasi Indeks Pelayanan Publik hingga triwulan I tahun 2022	233
Tabel 40. Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	234
Tabel 42. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik hingga triwulan I tahun 2022	237
Tabel 43. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	238
Tabel 45. Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2022	241
Tabel 46. Perbandingan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	242
Tabel 48. Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman hingga triwulan I tahun 2022	244
Tabel 49. Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	245
Tabel 52. Jumlah desa pangan aman hingga triwulan I tahun 2022	247
Tabel 53. Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024	248
Tabel 56. Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas hingga triwulan I tahun 2022	250
Tabel 58. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	251
Tabel 61. Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar hingga triwulan I tahun 2022	253
Tabel 62. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	253
Tabel 64. Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	256
Tabel 65. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	257
Tabel 67. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	259
Tabel 68. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	260
Tabel 70. Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya hingga triwulan I tahun 2022	263
Tabel 71. Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya	264
Tabel 73. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya hingga triwulan I tahun 2022	265
Tabel 74. Kategori Penilaian SAKIP	266
Tabel 75. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	266
Tabel 77. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya hingga triwulan I tahun 2022	268
Tabel 78. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya hingga triwulan I tahun 2022	268

Tabel 80. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP hingga triwulan I tahun 2022	270
Tabel 81. Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	271
Tabel 83. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal hingga triwulan I tahun 2022	273
Tabel 84. Perbandingan Realisasi pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	274
Tabel 86. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya hingga triwulan I tahun 2022	276
Tabel 87. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022	276
Tabel 88. Tingkat Efisiensi Kegiatan	280

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2021-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, BBPOM di Surabaya menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan *premarket*, *postmarket*, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Intensifikasi dalam pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta masyarakat sebagai konsumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi, disisi lain adalah merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM.

Perubahan paradigma ini juga disikapi BBPOM di Surabaya dengan kebijakan penguatan kapasitas BBPOM di Surabaya untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan BBPOM di Surabaya ke masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap

pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 23 Tahun 2021 tanggal 08 Juni 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Surabaya merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di Surabaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

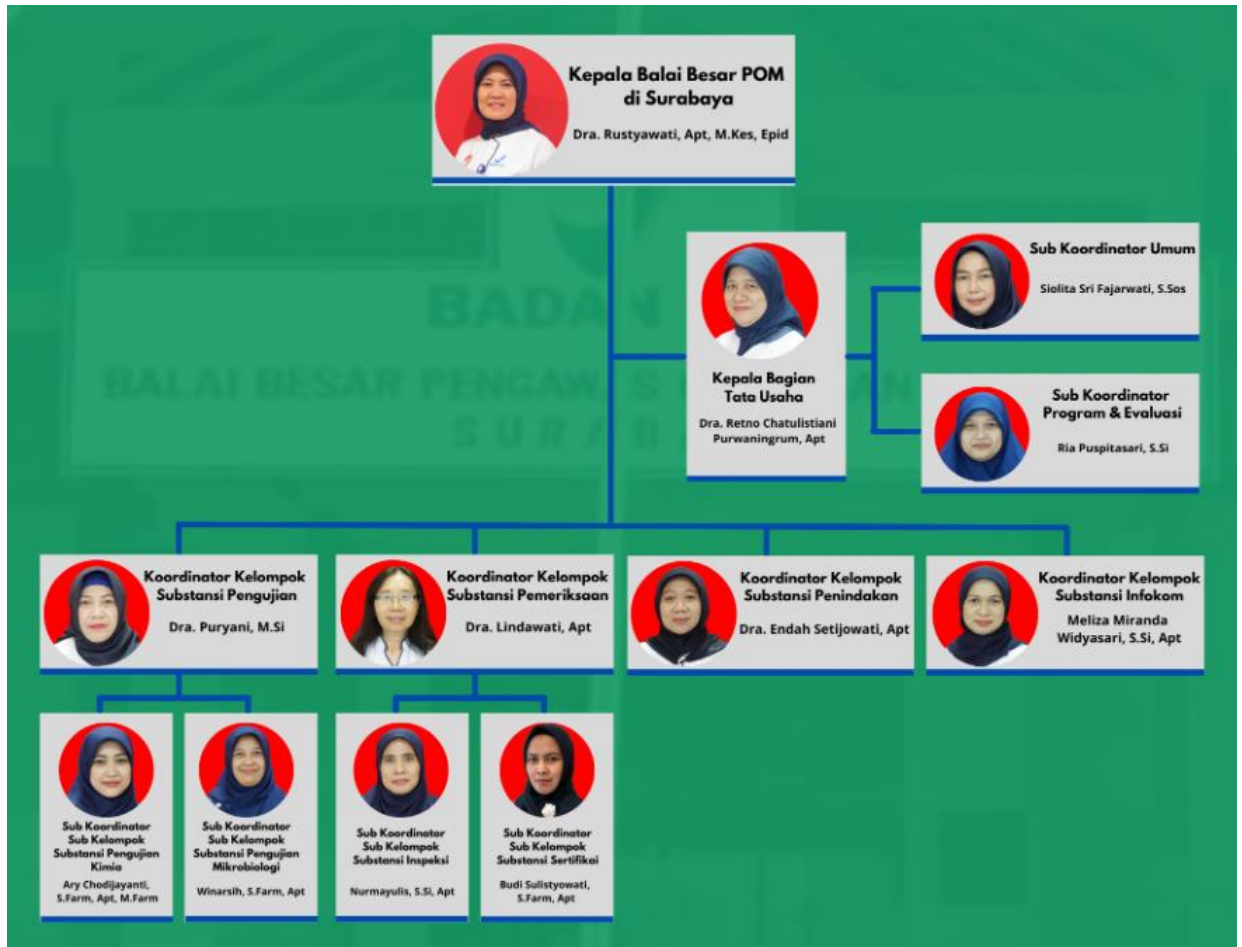
Terdapat 3 UPT BPOM di wilayah Provinsi Jawa Timur (terdiri dari 38 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Balai Besar POM di Surabaya, cakupan pengawasan meliputi 27 kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep).
- b. Loka POM di Kabupaten Kediri, cakupan pengawasan meliputi 6 (enam) kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar)
- c. Loka POM di Kabupaten Jember, cakupan pengawasan meliputi 5 (lima) kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang)

Balai Besar POM di Surabaya menyelenggarakan tugas dan fungsi :

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur, maka pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Surabaya guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. 02.01.1.2.12.20.1150. tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Balai Besar POM di Surabaya menyelenggarakan uraian fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi meliputi pengujian rutin dan dalam rangka investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pengujian yang terdiri atas:

- a. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Kimia;
 - b. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Mikrobiologi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemeriksaan meliputi inspeksi fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi, sampling serta pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan yang terdiri atas:

- a. Sub Kelompok Subtansi Inspeksi;
 - b. Sub Kelompok Subtansi Sertifikasi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber pada wilayah kerja masing-masing. Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penindakan.
4. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing.
5. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
 - c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
 - e. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Pengelompokan uraian fungsi Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subkelompok substansi program dan evaluasi;
- b. Subkelompok substansi umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proaktif control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Jawa Timur meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni :

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Timur;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan

dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan;

4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Surabaya dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.5. Analisis Lingkungan Strategis

Internal

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar POM di Surabaya sebanyak 141 orang. Rincian distribusi pegawai berdasarkan lokasi penempatan dan tingkat pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan

Lokasi Penempatan	S2	Apoteker	S1 Lain	D3	SLTA
Balai Besar POM di Surabaya	10	50	57	12	12

Sumber Daya Lainnya

- a. Kantor Balai Besar POM di Surabaya memiliki 2 (dua) bangunan gedung dengan total luas tanah 5.164,673 m² dan luas bangunan 4.496,09 m², didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di Surabaya memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu Balai Besar POM di Surabaya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001 : 2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya.

Keunggulan Balai Besar POM di Surabaya

- Laboratorium Unggulan Pengujian Rokok
- Laboratorium Rujukan Pengujian Endotoksin dan Sterilitas
- Laboratorium Pengujian Covid-19
- Mempunyai tenaga ahli sebagai evaluator yang aktif membantu proses pendaftaran pangan melalui *e-registration*.
- Pengembangan layanan publik bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan fasilitas di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan fasilitas Bakorwil di Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jember.

Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Surabaya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021 No. SP DIPA-063.01.2.432784/2021 yang diterbitkan pada tanggal 17 Nopember 2021 sebesar Rp56.083.984.000,- (lima puluh enam milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan blokir dalam rangka penanganan pandemi covid 19 sebesar Rp.892.256.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Eksternal

Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Jawa Timur terletak pada 111⁰ hingga 1114⁰⁴' Bujur Timur dan 7⁰¹²' hingga 8⁰⁴⁸' Lintang Selatan. Wilayah Provinsi Jawa Timur seluas 47.963 km². Cakupan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah penduduk 38.610.202 jiwa.

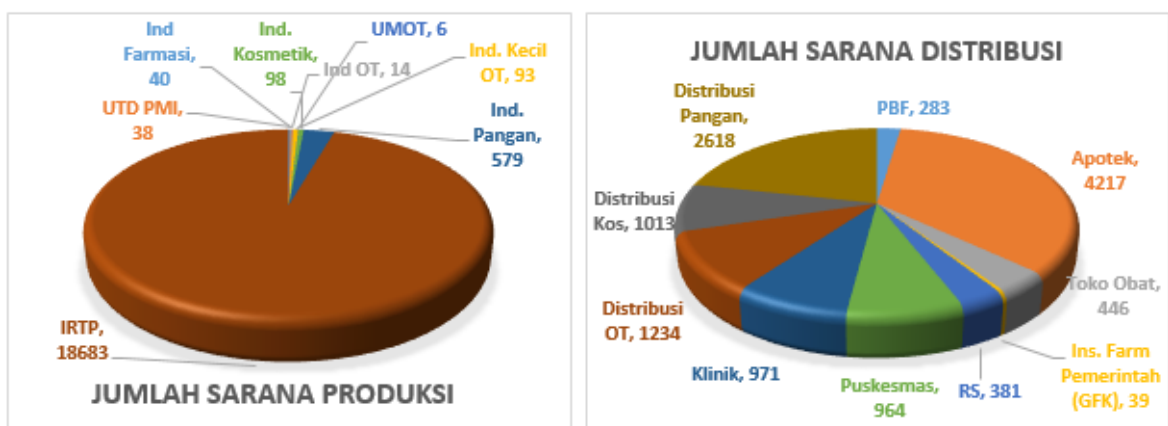
Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya, Loka POM di Kabupaten Kediri dan Loka POM di Kabupaten Jember



Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya dan Loka POM

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagaimana pada gambar 3. tersebut di bawah ini.



Gambar 3. Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa Timur

1.6. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Surabaya antara lain :

1. **Generasi *Stunting* Mengancam Masa Depan Bangsa**

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. *Stunting* ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization* (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai Besar POM di Surabaya melakukan pengawasan *post-market* dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. **Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara *Online***

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Balai Besar POM di Surabaya sejak tahun 2014 melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara *on-line*, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

3. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di Surabaya meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat serta mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan sampling dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

4. Keamanan pangan di masyarakat desa, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha pangan desa

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di perdesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk perdesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK dan karang taruna. Hingga tahun 2021 Balai Besar POM di Surabaya baru dapat mengintervensi 572 desa dari 8.499 desa yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kecilnya jumlah desa yang diintervensi ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait agar dapat ikut serta menggalakkan sosialisasi tentang keamanan pangan di seluruh desa.

Masyarakat sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan mempunyai peran penting dalam memilih dan menggunakan produk sehingga kesehatannya tetap terjaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi produk-produk yang kemungkinan dapat merugikan kesehatan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya sehingga masyarakat terhindar dari produk yang tidak memenuhi syarat.

5. Reformasi Birokrasi (WBK/WBBM)

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada tahun 2017. Tahun 2021 Balai Besar POM di Surabaya kembali mempersiapkan mengajukan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), sehingga diperlukan upaya sosialisasi program pengawasan Obat dan Makanan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat antara lain kemudahan akses informasi. Sebagai bentuk komitmen untuk menuju WBBM telah diluncurkan 29 inovasi termasuk inovasi pelayanan publik antara lain GEMPUR (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat) Jatim berupa pendampingan awal penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan fasilitasi pendaftaran pangan kepada UMKM pangan hingga produk pangan yang diproduksi mendapatkan ijin edar MD dari Badan POM; SURAMADU (Telusur Uji Pihak Ketiga Terpadu) yaitu layanan yang terdapat di website www.bbpom-surabaya.pom.go.id bagi pengguna layanan pengujian sampel Obat dan Makanan dari instansi lain, berupa informasi status proses penanganan sampel sejak diterima hingga diterbitkan sertifikat hasil uji; SERASI (Sistem Informasi Registrasi dan Sertifikasi) berupa Layanan yang terdapat di website www.bbpom-surabaya.pom.go.id bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai tata cara pendaftaran dan mendapatkan nomor registrasi produk obat dan makanan di Badan POM berupa *QnA* dan video sosialisasi, layanan permintaan audit sarana produksi bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan produknya berupa status permohonan sejak diterima hingga keluar jadwal audit ke sarana. Pada akhir tahun 2021, BBPOM di Surabaya memperoleh kehormatan untuk mendapat piagam predikat WBBM secara langsung dari Menteri PAN dan RB di Jakarta. Hal ini menjadikan pemicu bagi BBPOM di Surabaya untuk terus meningkatkan pelayanan dan memperkuat integritas supaya dapat mempertahankan predikat WBBM yang telah diterima.

6. Implementasi Inpres 3 tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan,

pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Surabaya sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 31 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian ijin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaraan bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan keferamasian dalam pemenuhan standart dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, *monitoring* tindak lanjut pengawasan sarana. BBPOM Surabaya melaksanakan pendampingan dan *monitoring* pelaksanaan DAK di Provinsi Jawa Timur.

7. UMKM di Jawa Timur

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, sektor industri pengolahan merupakan sektor pendukung utama perekonomian Jawa Timur dengan kontribusi terbesar yaitu sekitar 30% pada tahun 2019. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan pertumbuhan di atas 4% untuk lima tahun terakhir, di mana industri pengolahan pangan memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp 248,7 triliun dengan pertumbuhan 14,51%, termasuk di dalamnya UMKM di bidang pangan.

Melihat data tersebut, tampak bahwa sektor UMKM merupakan sektor andalan di Jawa Timur sehingga peran UMKM dalam proses pembangunan di Jawa Timur patut diberi perhatian lebih. Jangkauan pemasaran komoditas hasil olahan makanan dan minuman adalah pasar lokal Jawa Timur, antar daerah di luar Jawa Timur (ekspor antar daerah), serta sebagian kecil diekspor ke luar negeri. Sebagai salah satu upaya penguatan daya saing produk, pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai program *One Pesantren One Product* (OPOP) untuk memberdayakan para santri yang dipelopori oleh pesantrenpreneur di bawah naungan Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Disamping itu, Pemerintah Daerah Kota Surabaya juga meluncurkan program inovasi pendampingan UMKM dengan nama Pahlawan Ekonomi. Program ini berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga miskin yang ingin mengembangkan usaha UMKM. Program ini berupaya memberi pendampingan bagi UMKM, sejak tahap awal bimbingan mental, pembuatan produk, pengemasan, pemasaran, hingga promosi. Jumlah UMKM yang menjadi peserta Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda terus bertambah secara signifikan. Pada tahun pertama atau 2010,

jumlah UMKM yang ikut pelatihan tak lebih dari 92 UMKM. Sedangkan hingga tahun 2017, jumlahnya mencapai 8.565 UMKM. Selain itu juga ada program pendampingan kepada para mahasiswa yang dipelopori oleh Big Indonesia. Hal ini mendorong BBPOM di Surabaya untuk turut serta membantu mewujudkan UMKM yang dapat menghasilkan produk yang berdaya saing sehingga dapat meningkatkan perekonomian rakyat dengan membuat inovasi program pendampingan yang diberi nama (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat) GEMPUR JATIM.

8. Pandemi Covid-19 dan Laboratorium Uji Covid di BBPOM di Surabaya

Pada 11 Maret 2021, WHO (*World Health Organization*) telah menetapkan corona virus *disease* 2019 (Covid-19) sebagai pandemi. Virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019, dan sudah menjalar ke 221 negara dan wilayah lain di seluruh dunia.

Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya *physical/social distancing*, melakukan tes massal atau *rapid test* untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan corona virus *disease* 2021 (Covid-19), K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin.

Balai Besar POM di Surabaya melaksanakan kinerja dan pelayanan publik dengan metode *work from home* (WFH). Pelaksanaan pengawasan dioptimalkan melalui *desktop inspection*, pelayanan publik dilakukan melalui *online*, dan layanan sampel pihak ketiga dilakukan secara *on-call* menggunakan sistem piket. Selain itu Balai Besar POM di Surabaya mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara *online*; melakukan pembuatan *hand sanitizer* dan desinfektan untuk digunakan oleh pegawai; menyediakan wastafel di halaman kantor untuk dipergunakan masyarakat umum; dan melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari).

Seiring dengan semakin meningkatnya penderita Covid-19 di Indonesia, Badan POM merespon kebutuhan masyarakat dengan menunjuk beberapa Balai di seluruh Indonesia termasuk Balai Besar POM di Surabaya untuk menjadi laboratorium uji covid. Sejak tanggal 10 Nopember 2020 laboratorium BBPOM di Surabaya telah mendapat akun *new all record* untuk melaporkan hasil uji sampel covid-19 yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan untuk kemudian dilakukan *tracing* pasien covid yang positif. Kapasitas uji Laboratorium BBPOM di Surabaya adalah 90 sampel per hari dan telah menerima sampel covid dari Dinkes Kabupaten Jember, Dinkes Kabupaten Banyuwangi, Dinkes Kabupaten Nganjuk, Dinkes Kabupaten Ponorogo, Dinkes Kabupaten Mojokerto, dan BBPOM di Denpasar dengan total 9.077 sampel hingga akhir tahun 2021.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :



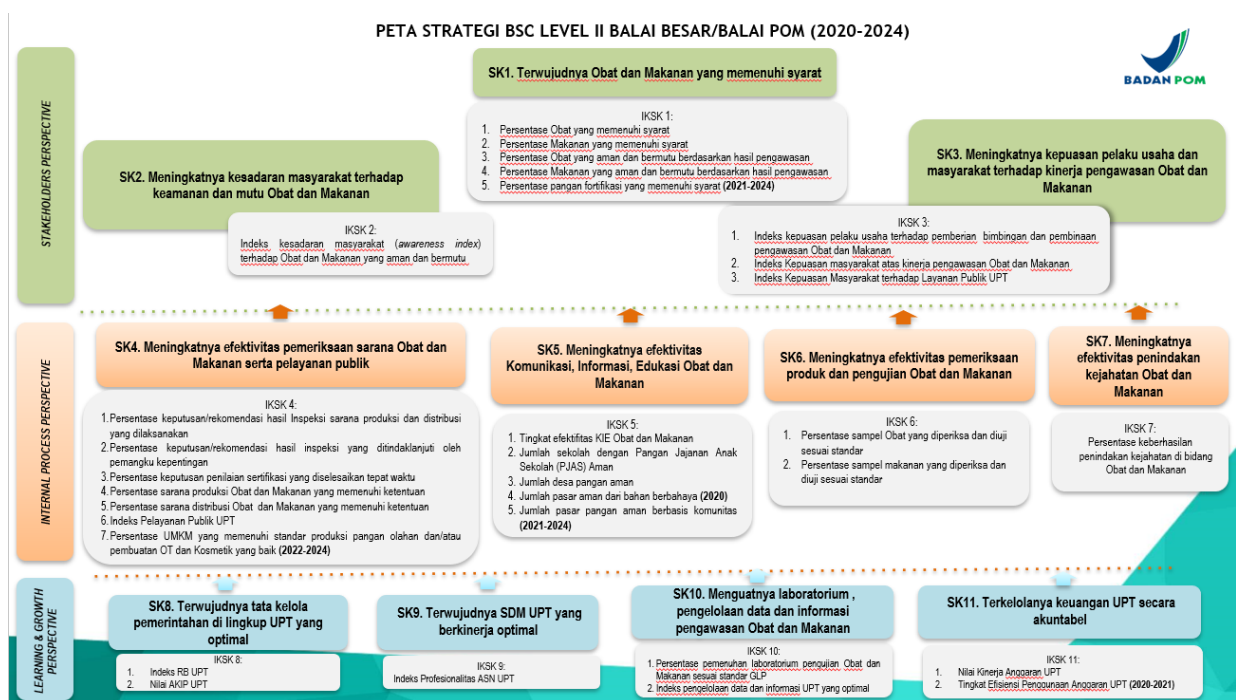
Gambar 4. Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai Besar POM di Surabaya berdasarkan Renstra 2020-2024 dan Reviu Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Surabaya maka Balai Besar POM di Surabaya menggunakan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024.

Pada tahun 2021, telah dilakukan Reviu Renstra 2020-2024 BBPOM di Surabaya mengacu pada Reviu Renstra BPOM dan berlaku mulai 01 Oktober 2021. Reviu Renstra BBPOM di Surabaya tidak merubah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, hanya terdapat sedikit perubahan pada kebijakan dan strategi, serta perubahan nomenklatur indikator dan perubahan jumlah indikator dari 29 indikator menjadi 30 indikator.

2.2. Rencana Kerja Tahun 2022

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2020-2024 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2022.

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2022 Balai Besar POM di Surabaya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	79
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84,7
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77,09
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,5
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62
		Indeks Pelayanan Publik	4,45
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	60
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,92
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76
		Jumlah desa pangan aman	28
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	18
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	87,2
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	84,1
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,25
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	94

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Surabaya menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Surabaya Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp56.083.984.000,- (lima puluh enam milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Surabaya.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	79

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya		
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84,7
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77,09
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,5
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,5
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62
		Indeks Pelayanan Publik	4,45
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	60
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,92
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76
		Jumlah desa pangan aman	28
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	18
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	87,2
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	84,1
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,25
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	94

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Kegiatan :		Anggaran :
	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		56.083.984.000

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Surabaya sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Surabaya) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM Surabaya selalu di-*monitoring* dan dievaluasi setiap bulan melalui aplikasi BOC dan setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap bulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap bulan pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sebagai berikut.

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	-	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	626.084.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	-	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	299.032.800
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	156.521.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	154.047.200
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	73.957.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	260.000.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)		
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12			
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,7	180.260.000	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,09	350.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,5	111.519.000	
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	48.860.000	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	468.944.000	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	870.278.000	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	473.668.000	
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	876.011.000	
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	111.519.000
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	16	25	33	33	41	50	58	66	75	83	91	60	60	390.696.000	
		5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	-	92,92	92,92	92,92	92,92	92,92	92,92	92,92	92,92	92,92	92,92	92,92
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-			5	15	20	25	40	50	60	75	90	95	76	76	785.661.000	
Jumlah desa pangan aman	-			5	15	20	25	35	40	47,5	65	70	85	28	28	1.195.660.000	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-			5	28	40	60	60	70	70	80	90	90	18	18	604.499.000	
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	-	5	13	21	29	37	47	57	67	77	87	100	100	782.605.000	
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	-	8	17	27	36	43	53	63	73	83	93	100	100	453.080.000	
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	10	15	20	25	30	35	40	50	55	60	68	68	1.540.316.000	
8	Terwujudnya tata kelola	Indeks RB BBPOM di Surabaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,2	26.311.506.000	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,1	367.340.000
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,25	181.550.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	9.346.530.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	462.840.000
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	-	5	15	30	50	55	60	65	70	75	80	94	39.600.000

2.5. Metode Pengukuran

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

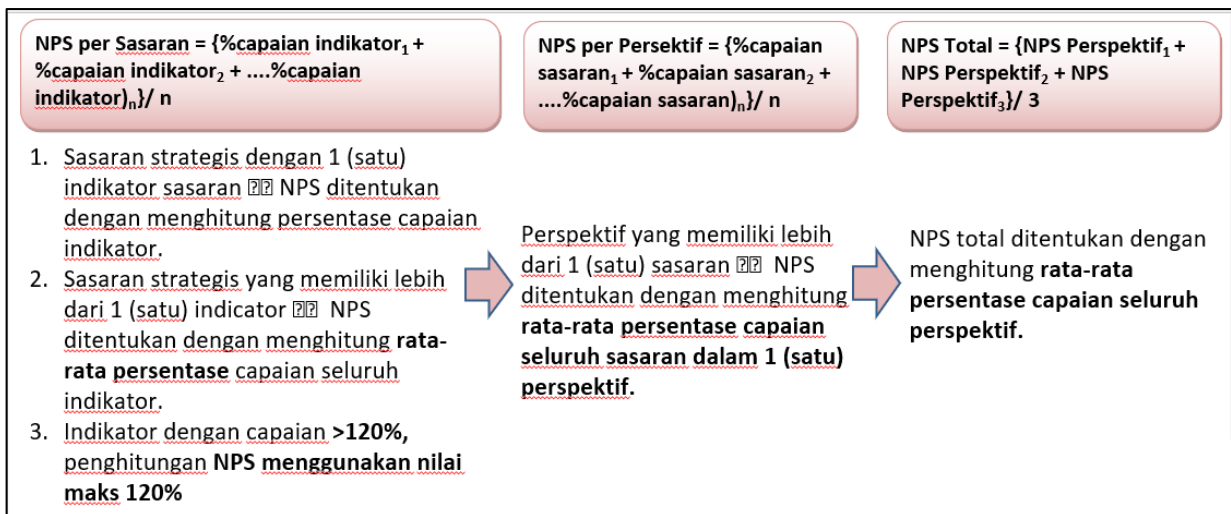
Sangat kurang	• capaian target indikator < 50
Kurang	• capaian target indikator 50 - < 70
Cukup	• capaian target indikator 70 - < 90
Baik	• capaian target indikator 90 - < 110
Sangat baik	• capaian target indikator 110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	• capaian target indikator > 120

Gambar 6. Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk:


1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan *monitoring* kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):



Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Surabaya yang disahkan dalam SK Kepala BPOM
2. Kepala BBPOM di Surabaya menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Surabaya
3. Penanggung jawab data di setiap bidang meng-*input* data kinerja pada data base *online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk meng-*input* data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Bappenas dan aplikasi *e-performance*.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang sedang dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC) serta pengukuran kinerja secara *cascading* dari level eselon 2 hingga individu untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun akan diintegrasikan dengan aplikasi Simakin (Aplikasi Manajemen Kinerja) pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.

- 
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin setiap bulan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Surabaya guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan I dan target akhir tahun 2022, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan I dengan triwulan sebelumnya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan I tahun 2022, diperoleh nilai NPSS sementara sebesar 104.63% dengan kriteria BAIK, namun baru 6 sasaran strategis yang bisa dievaluasi. 5 sasaran strategis lainnya belum bisa dievaluasi, menunggu hasil penilaian dari pusat dan penilaian akhir tahun dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 5. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	102,44	Baik
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	-	-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	-	-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	97,66	Baik
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	68,65	Kurang
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	134,64	Tidak dapat disimpulkan
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	119,05	Sangat Baik
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	-	-
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	-	-
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	-	-
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	445,28	Tidak dapat disimpulkan

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah diperjanjikan 11 sasaran strategis dan 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I 2022	CAPAIAN 2022
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5	80,23	87,68
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	87,5	106,71
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,6	75,81	87,54
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	100	138,89
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	81,333	91,39
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	6	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	98,44	108,18
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69	61,905	89,72
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,5	96,09	97,55
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	50,98	84,97
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	57,46	92,68
		15	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	33	37,25	112,89

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I 2022	CAPAIAN 2022
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,92	98,07	105,54
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	15	10	66,67
		19	Jumlah desa pangan aman	15	10	66,67
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	28	10	35,71
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	13	19,554	150,42
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	17	20,208	118,87
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	17,857	119,05
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	24	Indeks RB BBPOM di Surabaya	-	-	-
		25	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	-	-	-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,5	2,2	88
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	15	66,792	445,28

Dari 20 (dua puluh) indikator yang dapat dievaluasi, terdapat **1 indikator** dengan kategori “kurang”, **7 indikator** dengan kategori “cukup”, **6 indikator** mencapai target dengan kriteria “baik”, **3 indikator** dengan kategori “sangat baik”, dan sebanyak **3 indikator** mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”. Kriteria baik dan sangat baik menunjukkan bahwa target triwulan tahun 2022 sudah dapat tercapai.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Surabaya, sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai Besar POM di Surabaya

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 7. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULAN	REALISASI BULAN	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	-	100	-	-
Bulan Pebruari 2022	91,5	83,87	91,66	Baik
Bulan Maret 2022	91,5	80,23	87,69	Cukup

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat hingga triwulan I, diperoleh dari hasil pemeriksaan 172 sampel acak obat yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 138 sampel MS (memenuhi syarat) dan 34 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2022 **belum mencapai target** yaitu 87.69 % dengan kriteria “**Cukup**”

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 8. Perbandingan Realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	91,5	80,23	87,69	Cukup

Realisasi Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat hingga triwulan I tahun 2022 **belum mencapai** target tahun 2022 dengan kriteria Cukup. Perlu dilakukan perbaikan berkesinambungan agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat pada triwulan I tahun 2022 belum mencapai target dengan kriteria cukup. Hal ini disebabkan belum semua sampel obat yaitu obat kuasi yang belum dilakukan sampling dan pengujian di triwulan I. Obat kuasi direncanakan sampling dan pengujian pada triwulan 2 dikarenakan menunggu metode pengujian dari PPPOMN.

Sampel obat yang disampling di triwulan I sebanyak 531 sampel, sedangkan yang telah dilakukan pengujian sebanyak 172 sampel dengan hasil 138 sampel Memenuhi Syarat dan 34 sampel Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan).

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> Sudah ada realisasi untuk Persentase Obat yang memenuhi syarat, tetapi disebabkan belum adanya target bulan Januari yang ditetapkan sehingga Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat bulan Januari tidak bisa dihitung 	<ul style="list-style-type: none"> Belum semua komoditi obat yaitu obat kuasi dilakukan sampling Metode analisa untuk pengujian obat kuasi belum tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat, belum mencapai target pada triwulan I
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Menunggu penetapan target bulan Januari Persentase Obat yang memenuhi syarat Monev Persentase Obat yang memenuhi syarat 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penjadwalkan kembali untuk sampling dan pengujian obat kuasi Berkoordinasi dengan PPPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi lebih intensif dengan PPPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Segera menetapkan target bulan Januari Persentase Obat yang memenuhi syarat • Monev Persentase Obat yang memenuhi syarat 	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan sampling obat kuasi pada triwulan 2 • Berkoordinasi dengan PPPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi lebih intensif dengan PPPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dapat menghitung %Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat pada bulan Januari 2022 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kegiatan sampling dan pengujian obat kuasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua komoditi obat yaitu obat kuasi dilakukan sampling
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Pebruari <ul style="list-style-type: none"> • %Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat pada bulan Februari 91.66% Kondisi Maret <ul style="list-style-type: none"> • %Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat pada bulan Maret 87.69% 	Kondisi Maret <ul style="list-style-type: none"> • Sampling obat kuasi direncanakan pada triwulan 2 	Kondisi April -

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN BULANAN 2022	KRITERIA
Bulan Januari 2022	-	-	-	-
Bulan Pebruari 2022	82	93,65	114,21	Sangat Baik
Bulan Maret 2022	82	87,5	106,71	Baik

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman

bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5.

Realisasi Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat BBPOM di Surabaya hingga TW I tahun 2022 adalah 87,50. Capaian Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat di TW I sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 106,71.

b. **Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022**

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	82	87,5	106,71	Baik

Realisasi Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat hingga triwulan I tahun 2022 **sudah mencapai** target tahun 2022 dengan kriteria baik. Capaian ini perlu dipertahankan hingga akhir tahun 2022.

c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Capaian Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat hingga triwulan I tahun 2022 sudah melampaui target dengan kriteria baik. Hal ini disebabkan belum semua sampel yang masuk di TW I dilakukan pengujian. Dari 202 sampel yang masuk hingga TW I baru sebanyak 120 sampel dilakukan pengujian dengan hasil 105 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan sebanyak 15 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) serta 5 sampel Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan.

d. **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)**

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukan pengujian sampel di bulan Januari, jadi 	<ul style="list-style-type: none"> Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji 	<ul style="list-style-type: none"> Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
	belum ada realisasi yang dihitung di bulan Januari.	<ul style="list-style-type: none"> Dikarenakan pandemi, seluruh pegawai WFH 100% 	namun Target Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sudah tercapai
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Pengujian harus segera dilakukan setelah pembagian regionalisasi sudah ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan pengujian sampel bila kasus Covid19 menurun 	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan pengujian sisa sampel karena covid sudah menurun dan WFO 100%
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Monev terhadap pengujian sampel makanan acak 	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan pengujian sampel makanan acak di bulan berikutnya 	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan pengujian sampel makanan acak di bulan berikutnya
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat 0%, belum ada sampel yang diuji 	<ul style="list-style-type: none"> Dari 139 sampel yang disampling, baru dilakukan pengujian 63 sampel 	<ul style="list-style-type: none"> Dari 139 sampel yang disampling bulan pebruari, baru dilakukan pengujian 120 sampel
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Pebruari <ul style="list-style-type: none"> Sudah dilakukan pengujian 63 sampel 	Kondisi Maret <ul style="list-style-type: none"> Sampling hingga pebruari belum diuji seluruhnya 	Kondisi April <ul style="list-style-type: none"> -

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 11. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	-	-	-	-
Bulan Pebruari 2022	86,6	81,25	93,82	Baik
Bulan Maret 2022	86,6	75,81	87,54	Cukup

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling

targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5.

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu hingga triwulan I, diperoleh dari hasil pemeriksaan 62 sampel targeted obat yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 47 sampel MS (memenuhi syarat) dan 15 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Capaian persentase obat yang aman dan bermutu pada triwulan I tahun 2022 **belum mencapai target** yaitu 87.54 % dengan kriteria “**Cukup**”.

b. **Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022**

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,6	75,81	87,54	Cukup

Realisasi Persentase Obat Yang aman dan Bermutu hingga triwulan I tahun 2022 **belum mencapai** target tahun 2022 dengan kriteria Cukup. Perlu dilakukan perbaikan berkesinambungan agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Capaian Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu pada triwulan I tahun 2022 belum mencapai target dengan kriteria cukup. Hal ini disebabkan Sampel obat yang disampling di triwulan I sebanyak 175 sampel, sedangkan yang telah dilakukan pengujian sebanyak 62 sampel dengan hasil 47 sampel Memenuhi Syarat dan 15 sampel Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan). Adanya perbedaan klaim MK dan TMK penandaan antara petugas balai dan pusat. Belum semua sampel obat yaitu obat kuasi yang belum dilakukan sampling dan pengujian di triwulan I. Obat kuasi direncanakan sampling dan pengujian pada triwulan 2 dikarenakan menunggu metode pengujian dari PPPOMN.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> Sudah ada realisasi untuk Persentase Obat yang memenuhi syarat, tetapi disebabkan belum adanya target bulan Januari yang ditetapkan sehingga Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat bulan Januari tidak bisa dihitung 	<ul style="list-style-type: none"> Belum semua komoditi obat yaitu obat kuasi dilakukan sampling Metode analisa untuk pengujian obat kuasi belum tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu, belum mencapai target pada triwulan I
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Menunggu penetapan target bulan Januari Persentase Obat yang aman dan bermutu Monev Persentase Obat yang aman dan bermutu lebih ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penjadwalkan kembali untuk sampling dan pengujian obat kuasi Berkoordinasi dengan PPPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi lebih intensif dengan PPPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi Melakukan koordinasi dengan pusat terkait klaim MK dan TMK Penandaan
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Segera menetapkan target bulan Januari Persentase Obat yang memenuhi syarat Monev Persentase Obat yang memenuhi syarat 	<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan sampling obat kuasi pada triwulan 2 Berkoordinasi dengan PPPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi lebih intensif dengan PPPOMN agar dapat mempercepat penerbitan Metode Analisa untuk pengujian obat kuasi
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dapat menghitung %Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat pada bulan Januari 2022 	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada kegiatan sampling dan pengujian obat kuasi 	<ul style="list-style-type: none"> Belum semua komoditi obat yaitu obat kuasi dilakukan sampling
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<p>Kondisi Pebruari</p> <ul style="list-style-type: none"> %Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat pada bulan Februari 91.66% <p>Kondisi Maret</p> <ul style="list-style-type: none"> %Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat pada bulan Maret 87.69% 	<p>Kondisi Maret</p> <ul style="list-style-type: none"> Sampling obat kuasi direncanakan pada triwulan 2 	<p>Kondisi April</p> <p>-</p>

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 13. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga triwulan I Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	-	100	-	-
Bulan Pebruari 2022	72	100	138,89	Tidak dapat disimpulkan
Bulan Maret 2022	72	100	138,89	Tidak dapat disimpulkan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 19 sampel targeted pangan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan hasil 19 sampel MS (Memenuhi Syarat) semua. Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di TW I tahun 2022 sudah **melebihi target** yang ditetapkan yaitu 138,89 % dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	100	138,89	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi nilai kinerja anggaran hingga triwulan I tahun 2022 **melampaui** target tahun 2022 dengan kriteria Tidak Dapt disimpulkan. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian Persentase Makanan Yang Bermutu berdasarkan pengawasan hingga triwulan I tahun 2022 yang sudah melampaui target. Sampel Targeted Pangan menurut Pedoman Sampling tahun 2022 terdiri dari 95 sampel yaitu sampel PJAS sebanyak 76, sampel kemasan pangan sebanyak 6, DNA Babi, Laboratorium Air. Sampai TW I sampel PJAS yang masuk pengujian sebanyak 22 sampel dan yang dilakukan pengujian baru 19 dengan hasil MS (Memenuhi Syarat) dan masih 3 sampel yang belum dilakukan uji laboratorium. Belum semua sampel PJAS dilakukan sampling di bulan Maret dikarenakan kota sasaran untuk sampling PJAS sedang naik kasus covid19 sehingga sampling PJAS mundur di bulan April.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada target Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu berdasarkan pengawasan • Sudah ada realisasi sampling namun belum semua selesai diuji • Dikarenakan pandemi, sekolah yang menjadi target sampling PJAS belum semua kantin sekolah buka atau belum banyak pedagang yang sudah berjualan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum banyak kantin sekolah yang buka sehingga sulit mendapatkan sampel PJAS • Sampel PJAS potensi MS (Memenuhi Syarat) dikarenakan sampling dilakukan terhadap sampel yang ada di lingkungan sekitar sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Karena kasus covid 19 meningkat tidak dapat dilakukan sampling PJAS di tempat sasaran di tanggal yang direncanakan • Minggu kedua Maret akan dilakukan sampling namun petugas mengikuti Pemetaan Kompetensi • Sudah dilakukan sampling pada minggu ketiga namun sampel tersebut dimasukkan di bulan April
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Akan dilakukan Sampling di luar kantin sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Akan dilakukan Sampling di luar kantin sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pengujian di bulan April
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sampling PJAS di lingkungan sekitar sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sampling PJAS di lingkungan sekitar sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Monev dilakukan setiap bulan

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi sampling pangan targeted januari 9 sampel, selesai diuji 2 sampel 	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat 100%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Pebruari <ul style="list-style-type: none"> Realisasi sampling hingga Pebruari 21 sampel, selesai diuji 7 sampel 	Kondisi Maret <ul style="list-style-type: none"> Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat 100% dengan capaian 138,89% 	Kondisi April -

5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 15. Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	-	-	-	-
Bulan Pebruari 2022	89	0	0	Kurang
Bulan Maret 2022	89	81,333	91,39	Baik

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Realisasi persentase makanan fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan hingga TW I diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 75 sampel fortifikasi pangan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan hasil 61 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 14 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) hasil uji. Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 91,39 % dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 16. Perbandingan Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	81,333	91,39	Baik

Realisasi nilai kinerja anggaran hingga triwulan I tahun 2022 **belum mencapai** target tahun 2022 meskipun dengan kriteria Baik. Perlu monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sampel Pangan Fortifikasi terdiri dari Garam Konsumsi Beryodium, Minyak Goreng dan Tepung Terigu. Sampling yang dilakukan hingga TW I adalah garam konsumsi beryodium sebanyak 75 sampel, dengan hasil uji TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebanyak 14 sampel, MS (Memenuhi Syarat) sebanyak 64 sampel dan 22 sampel Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan. Dari 14 sampel sampel yang tidak memenuhi syarat adalah parameter kurangnya KIO3 dalam sampel tersebut (hasil uji KIO3 kurang dari 30 ppm).

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
Kendala/Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada target di bulan Januari • Belum dilakukan sampling di bulan Januari dikarenakan adanya pembagian sampel regionalisasi baru selesai di akhir Januari sehingga jadwal sampling menyesuaikan. Jadi belum ada realisasi yang dihitung di bulan Januari. 	<ul style="list-style-type: none"> • sampling Pangan Fortifikasi sudah dilakukan namun belum ada realisasi sampel yang diuji sehingga Realisasi maupun capaian Persentase Pangan Fortifikasi belum bisa dihitung • Sampel hingga bulan Februari belum dilakukan pengujian karena personil WFH 100% 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua jenis pangan fortifikasi yang disampling, sampel fortifikasi hingga TW1 adalah garam konsumsi Beryodium • Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat sudah masuk kriteria Baik meskipun kurang dari target
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sampling akan dilakukan setelah pembagian regionalisasi sudah ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pengujian sampel bila kasus Covid19 menurun 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring jenis sampling fortifikasi
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Akan menetapkan target bulan januari • Monev terhadap Persentase Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Monev terhadap sampel yang belum diuji beserta penandaannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring jenis sampling fortifikasi setiap bulan

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
	Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat		
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Sampling Pangan Fortifikasi 0 	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 0% 	<ul style="list-style-type: none"> • sampel fortifikasi hingga TW1 adalah garam konsumsi Beryodium • Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 91,39%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Pebruari <ul style="list-style-type: none"> • Sampling Pangan Fortifikasi 40 	Kondisi Maret <ul style="list-style-type: none"> • Semua sampel yg disampling (75 sampel) sudah selesai diuji • Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 81,333% dengan Capaian 91,39% 	Kondisi April <ul style="list-style-type: none"> • -

Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

1. **Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu**
 - a. **Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022**

Tabel 17. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	-	-	-	-
Bulan Pebruari 2022	-	-	-	-
Bulan Maret 2022	-	-	-	-

Indeks Kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan

mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

$$\text{Indeks Nasional} = \sum [\sum (\bar{R}_a \times b) \times c]$$

Keterangan:

\bar{R}_a adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Hingga triwulan I tahun 2022 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. Survey akan dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dan hasil pengukuran akan diperoleh di triwulan IV tahun 2022.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	-

Belum ada realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu hingga triwulan I tahun 2021 sehingga belum dapat dibandingkan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil survey kesadaran (*awareness*) masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2021 didapatkan bahwa indeks pengetahuan adalah 74,53; indeks sikap 77,13 dan indeks perilaku adalah 68,42. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, namun belum diikuti dengan perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait membaca informasi pada label/kemasan dan menyimpan produk sesuai informasi pada label.

Indeks kesadaran masyarakat ini secara nasional diukur terhadap komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan dengan hasil sebagai berikut : obat 79,26 (Baik); Obat Tradisional 75,51 (Baik); Suplemen Kesehatan 76,30 (Baik); Kosmetik 76,88 (Baik); Pangan Olahan 77,64 (Baik).

Dari hasil survey diketahui bahwa masyarakat pada umumnya telah mempunyai pengetahuan yang baik terhadap petunjuk penyimpanan dan tanggal kadaluwarsa produk Obat dan Makanan, namun pengetahuan tentang produk yang tidak terdaftar masih sangat rendah. Secara umum masyarakat telah memiliki sikap yang sangat baik terhadap kemasan yang masih bagus, efek samping, petunjuk penggunaan, petunjuk penyimpanan, terdaftar di BPOM dan mengetahui tanggal kadaluwarsa. Perilaku masyarakat juga cenderung mengalami peningkatan terhadap aspek membeli produk dengan kemasan baik, membaca informasi label/kemasan produk, menggunakan produk sesuai dengan aturan pakai, menyimpan produk sesuai informasi pada label, dan membaca informasi kadaluwarsa, namun terjadi penurunan perilaku masyarakat dalam membeli produk yang terdaftar di BPOM (mempunyai NIE).

Dari hasil survey tersebut diketahui bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu misalnya dengan memperhatikan izin edar, kemasan dan tanggal kadaluwarsa. Namun masih banyak juga yang belum mengetahui produk yang tidak terdaftar di BPOM atau membeli produk yang memiliki NIE. Masyarakat telah memperhatikan bagaimana menyimpan produk dengan aman dan menggunakan sesuai petunjuk yang ada di label. Namun masih juga ditemui masyarakat yang belum mengetahui adanya produk Obat dan

Makanan berbahaya yang beredar. Masyarakat juga tidak mengetahui logo obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter.

Dari hasil survey juga diketahui bahwa pengetahuan masyarakat merupakan indikator pembentuk indeks kesadaran yang nilainya paling tinggi yaitu 80,40 dan yang paling rendah adalah faktor perilaku yaitu 73,70. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan BBPOM Surabaya dalam melakukan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Metode yang dipilih dan waktu pelaksanaan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Penggunaan media sosial meskipun dirasa paling efektif untuk beberapa segmen masyarakat ternyata tidak mampu menyentuh semua segmen masyarakat. Masyarakat Jawa Timur yang sebagian besar tinggal di pedesaan ternyata tidak banyak memanfaatkan dan menggunakan media sosial. Pertemuan dan tatap muka secara langsung apalagi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama tetap mempunyai manfaat yang tidak dapat digantikan oleh media sosial. Karena itu BBPOM di Surabaya tetap melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di Jawa Timur sebagai juru tutur atau penyambung lidah BBPOM Surabaya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan yang aman dan bermutu.

Selama Triwulan I tahun 2022 BBPOM Surabaya tetap melakukan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) bersama tokoh masyarakat di 14 titik yaitu di Banyuwangi, Situbondo, Bojonegoro, dan Surabaya yang diikuti oleh kurang lebih 3100 orang. Selain KIE bersama Tokoh Masyarakat Anggota DPR RI, BBPOM Surabaya juga melaksanakan kegiatan KIE bersama instansi lain atau Perguruan Tinggi misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Perguruan Tinggi misalnya Universitas Airlangga dan Universitas Darrusallam Gontor. Selama Triwulan I tahun 2022 telah dilakukan 22 kali kegiatan KIE bersama stakeholder/lintas sektor tersebut. Topik yang disampaikan antara lain Keamanan Pangan, Tata Cara Registrasi Pangan, Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Pangan Keperluan Gizi Khusus, Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik UMKM, Pedoman Pemberian SPP IRT, Pelatihan DFI, Pendampingan UMKM, dll.

Dengan adanya pandemic Covid 19, BBPOM di Surabaya harus merubah strategi pemberian informasi kepada masyarakat. Informasi melalui media social menjadi pilihan yang dirasa tepat dan paling efektif pada kondisi sekarang ini. Layanan informasi yang semula dilakukan secara langsung dialihkan menjadi layanan melalui telpon dan media social antara lain WhatsApp, email, google review, Instagram, Twitter, dll. Selama triwulan I tahun 2022 BBPOM di Surabaya telah memberikan layanan sejumlah 1.187 layanan melalui WhatsApp, telpon, email dan google review. Selama masa PPKM masyarakat sudah beberapa kali menghubungi ULPK BBPOM di Surabaya agar diijinkan berkonsultasi secara langsung dan layanan secara langsung telah dilakukan secara full sejak bulan Maret 2022. Selain itu

BBPOM di Surabaya menambahkan layanan konsultasi melalui zoom meeting bagi konsumen yang menghubungi nomor WhatsApp BBPOM di Surabaya menggunakan platform kegiatan Cangkrukan namun dengan tagline “Anda Menanyakan Kami Menjawab”. Selama triwulan I tahun 2022, BBPOM di Surabaya telah melaksanakan kegiatan Cangkrukan sebanyak 5 kali yang diikuti oleh 206 peserta terdiri dari beberapa kelompok masyarakat. Topik yang disampaikan dalam Cangkrukan antara lain Pendaftaran Pangan Olahan versi Baru, Notifikasi Kosmetik, IP CPPOB melalui e sertifikasi dan lain lain.

Masyarakat memanfaatkan layanan melalui media sosial ini secara maksimal sekaitan dengan larangan tatap muka selama pandemic dan hal ini terbukti direspon secara positif oleh masyarakat. Media sosial lain yang dimanfaatkan oleh BBPOM Surabaya misalnya Instagram, Twitter, dan Facebook. Selama Triwulan I tahun 2022 BBPOM Surabaya telah menayangkan 339 layanan informasi melalui 3 media sosial tersebut. Selain itu BBPOM Surabaya juga selalu menayangkan infografis dan video informasi pada kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat atau lintas sektor. Selain melalui media sosial yang sedang menjadi sumber informasi utama bagi kaum milenial, BBPOM Surabaya juga melakukan sosialisasi dan pemberian informasi melalui media elektronik sebanyak 3 kali selama triwulan I tahun 2022 yaitu melalui 6000 sms blast di wilayah Kota Madiun, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Sampang. Selain itu juga menayangkan Iklan Layanan Masyarakat melalui Radio Suara Surabaya dengan topik Pendampingan UMKM dan Iklan Layanan Masyarakat melalui Radio EBS dengan topik Kosmetik dan Cek KLIK.

BBPOM Surabaya memanfaatkan semua komunitas yang telah dibentuk untuk menyebarkan infografis tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dikaitkan dengan kondisi pandemic covid 19. Pada Triwulan I tahun 2022, BBPOM Surabaya telah menyebarkan infografis melalui berbagai komunitas misalnya Pramuka, PKK, Salimah, Fatayat, Muslimah, Asprindo, Ismafarsi, dll. Semua komunitas tersebut merupakan agent of Change BBPOM Surabaya yang telah dibentuk dan mempunyai ikatan yang erat dengan BBPOM Surabaya. Infografis yang disebarluaskan oleh BBPOM Surabaya menjadi viral dan bergulir layaknya bola salju yang semakin besar dan menjadi counter informasi yang efektif untuk menangkal informasi yang menyesatkan (HOAX) yang banyak beredar di masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan sumber informasi dan hanya mempercayai informasi yang disampaikan oleh BBPOM Surabaya.

Semua upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat (awareness) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Upaya ini dilakukan baik di sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Produsen dan Konsumen merupakan bagian dari pilar pengawasan dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Masyarakat yang telah meningkat kesadarannya akan mampu memilih Obat dan Makanan yang aman bagi diri sendiri dan keluarganya. Peningkatan

pemberdayaan masyarakat akan memaksa produsen untuk memproduksi Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. *Community Empowerment will induce Voluntary Compliance*

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/Permasalahan	Kegiatan KIE belum dilaksanakan di seluruh wilayah kerja BBPOM Surabaya.	Metode KIE belum memanfaatkan media sosial dan media elektronik secara maksimal.	BBPOM Surabaya belum memanfaatkan komunitas komunitas masyarakat yang ada.
Rekomendasi/Perbaikan	KIE dilakukan secara merata di seluruh wilayah kerja BBPOM Surabaya.	KIE seharusnya memanfaatkan media sosial untuk generasi milenial dan media cetak dan elektronik untuk kelompok masyarakat yang lebih senior.	Agar digalang kembali komitmen kader kader masyarakat yang telah dibentuk. Dilakukan koordinasi dan komunikasi secara formal tetapi rutin dan konsisten untuk memelihara komitmen para kader.
Rencana Aksi	Membuat perencanaan KIE di luar daerah pilihan Tomas anggota DPR. Jika tersedia sisa anggaran dapat dilaksanakan di daerah daerah yang telah direncanakan tersebut.	Membuat jadwal rutin memuat berita dan informasi dengan topik yang ringan dan up date di media sosial yang sering diakses oleh generasi milenial. Menjalin Kerjasama dengan Dinas Kominfo Propinsi Jawa Timur untuk memanfaatkan media luar ruang (Videotron, dll) yang dimiliki untuk dimanfaatkan oleh BBPOM Surabaya.	Menjalin komunikasi dengan para kader. Membagikan informasi kepada para kader untuk diteruskan kepada komunitas anggotanya.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Hasil survey indeks kesadaran masyarakat belum mencapai target.	Hasil survey indeks kesadaran masyarakat belum mencapai target.	Hasil survey indeks kesadaran masyarakat belum mencapai target.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	-	Sudah dimuat ILM di radio swasta.	Mulai dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan komunitas komunitas yang telah dibentuk.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh 3 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 19. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	-	-	-	-
Bulan Pebruari 2022	-	-	-	-
Bulan Maret 2022	-	-	-	-

Pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

Rumus penghitungan indeks:

$$\text{Indeks Nasional} = \sum (\sum (\hat{E}Jk \times b) \times c)$$

Keterangan:

$\hat{E}Jk$ adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan
Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks:

- Aspek kepuasan: Tangible (0,16), Reliability (0,30), Responsiveness (0,20), Assurance (0,17), dan Empathy (0,17)
- Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110)
- Komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230)

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri.

Hingga triwulan I tahun 2022 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-

Belum ada realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2021 sehingga belum dapat dibandingkan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan bimbingan dan pembinaan yang dilakukan BBPOM di Surabaya pada triwulan I meliputi *Refreshment* Persyaratan SKE SKI untuk eksportir dan importir, *Desk consultation* IP CPPOB (Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) untuk UMK pangan olahan dalam rangka Gempur Jatim, dan Bimbingan Teknis Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) untuk UMKM Kosmetik dalam rangka Jatim Glowing. Seluruh kegiatan tersebut diselenggarakan secara daring mengingat kondisi pandemi covid-19 yang belum berakhir.

Dalam upaya peningkatan pelayanan public terkait penerbitan surat rekomendasi dalam rangka ekspor/impor produk dan bahan baku komoditi obat dan makanan, Balai Besar POM di Surabaya melaksanakan kegiatan persamaan persepsi antara eksportir/importir sebagai pemohon layanan tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan *timeline* penyelesaian evaluasi terkait penerbitan rekomendasi ekspor/ impor. Balai Besar POM di Surabaya memiliki program pendampingan UMK pangan olahan, UMKM obat tradisional, UMKM kosmetik. Kegiatan ini merupakan kegiatan inovasi untuk mendorong pelaku UMKM untuk menghasilkan produk yang memiliki bermutu, aman dan berdaya saing melalui peningkatan pengetahuan terkait cara produksi yang baik dan percepatan penerbitan ijin edar.

Dari seluruh kegiatan tersebut, telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan sistem IKEPU (Indeks Kepuasan Pelaku Usaha) sesuai arahan dari PRKOM untuk menilai kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik petugas BBPOM di Surabaya. Hasil dari survei tersebut belum diperoleh dari PRKOM karena pengolahan data survei dilakukan oleh PRKOM.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat eksportir / importir yang tidak 	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat eksportir / importir yang tidak 	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat eksportir / importir yang

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
	<p>memahami persyaratan SKE / SKI sehingga membutuhkan penilaian evaluasi dokumen yang lama/melebihi timeline</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama • Pemenuhan persyaratan SPA (Surat Pemenuhan Aspek) CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap oleh UMKM membutuhkan waktu lama 	<p>memahami persyaratan SKE / SKI sehingga membutuhkan penilaian evaluasi dokumen yang lama/melebihi timeline</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat pemenuhan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama • Masih terdapat pemenuhan persyaratan SPA (Surat Pemenuhan Aspek) CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap oleh UMKM membutuhkan waktu lama 	<p>tidak memahami persyaratan SKE / SKI sehingga membutuhkan penilaian evaluasi dokumen yang lama/melebihi timeline</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat pemenuhan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama • Masih terdapat pemenuhan persyaratan SPA (Surat Pemenuhan Aspek) CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap oleh UMKM membutuhkan waktu lama
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Menginformasikan kembali persyaratan SKE / SKI kepada eksportir / importir • Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat • Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap dan memberikan informasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB dan Sertifikasi CPOTB Bertahap 	<ul style="list-style-type: none"> • Menginformasikan kembali persyaratan SKE / SKI kepada eksportir / importir • Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat • Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap dan memberikan informasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB dan Sertifikasi CPOTB Bertahap 	<ul style="list-style-type: none"> • Menginformasikan persyaratan SKE / SKI kepada eksportir / importir • Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat • Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan <i>Refreshment</i> Persyaratan SKE / SKI pada bulan Maret dan membentuk grup <i>whatsapp</i> pengguna layanan SKE / SKI • Mengadakan <i>desk consultation</i> penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala • Mengadakan pendampingan kepada pelaku UMKM Kosmetik dan Obta Tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan <i>Refreshment</i> Persyaratan SKE / SKI pada bulan Maret dan membentuk grup <i>whatsapp</i> pengguna layanan SKE / SKI • Mengadakan <i>desk consultation</i> penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan <i>Refreshment</i> Persyaratan SKE / SKI pada bulan Maret dan membentuk grup <i>whatsapp</i> pengguna layanan SKE / SKI • Mengadakan <i>desk consultation</i> penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala • Mengadakan Bimtek CPKB untuk UMKM Kosmetik dalam rangka Jatim Glowing pada bulan Maret
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir • Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan masih rendah • Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir • Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan masih rendah • Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir / importir • Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan masih rendah

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
	CPOTB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama	CPOTB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama	• Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Pebruari <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan timeline penyelesaian evaluasi permohonan SKI/SKE • Pertanyaan ekportir / importir melalui grup WA dijawab secara cepat oleh petugas • Terdapat penambahan jumlah penerbitan IP CPPOB UMK Pangan • CAPA terkait dokumentasi CPKB dan CPOTB Bertahap bisa ditindaklanjuti oleh pemohon dengan lebih cepat 	Kondisi Maret <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan timeline penyelesaian evaluasi permohonan SKI/SKE • Pertanyaan ekportir / importir melalui grup WA dijawab secara cepat oleh petugas • Terdapat penambahan jumlah penerbitan IP CPPOB UMK Pangan • CAPA terkait dokumentasi CPKB dan CPOTB Bertahap bisa ditindaklanjuti oleh pemohon dengan lebih cepat 	Kondisi April -

2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 21. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	-	-	-	-
Bulan Pebruari 2022	-	-	-	-
Bulan Maret 2022	-	-	-	-

Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan obat dan makanan Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Nasional} = \sum [\sum (\bar{R}_a \times b) \times c]$$

Keterangan:

\bar{R}_a adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi (1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa; (2) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan; (3) Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran; (4) Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.

Hingga triwulan I tahun 2022 belum diperoleh hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,01	66,55	83,18	Cukup

Belum ada realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indeks Kepuasan Masyarakat untuk Propinsi Jawa Timur 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut : 69,78 pada tahun 2019; 74,18 pada tahun 2020 dan 66,55 pada tahun 2021.

Dari hasil survey Kepuasan Masyarakat selama 3 tahun terakhir terlihat bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan indeks kepuasan masyarakat yang sangat signifikan. Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut diukur baik secara langsung maupun tidak langsung. Indeks kepuasan yang diukur secara langsung yaitu dilihat sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles).

Komunikasi, Informasi, Edukasi kepada masyarakat dilakukan oleh BBPOM Surabaya melalui berbagai media baik media sosial, media cetak, media elektronik. Pemberian layanan informasi melalui tatap muka langsung masih dilakukan secara terbatas sampai akhir triwulan I tahun 2022 . Selama triwulan I tahun 2022 BBPOM Surabaya telah melakukan pemberian informasi sebanyak 1.540 melalui berbagai media antara lain WhatsApp, website, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, sms blast, radio, televisi, webinar (Cangkruan). Selain itu BBPOM Surabaya juga memberikan berbagai materi pemberian informasi sesuai dengan permintaan stakeholder. Selama Triwulan I tahun 2022, BBPOM Surabaya telah memenuhi permintaan narasumber sebanyak 22 kegiatan pemberian informasi/sosialisasi/bimbingan teknis dll. Topik yang disampaikan antara lain Keamanan Pangan, Tata Cara Registrasi Pangan, Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik bagi UMKM, Pedoman Pemberian SPP IRT, Label Pangan, Bahan Tambahan Pangan, dll.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan pemberian informasi dan memberikan layanan informasi yang lebih baik terutama di masa pandemi covid 19 ini, BBPOM Surabaya telah melahirkan sebuah inovasi Cangkru'an (Bincang dengan Kru Layanan). Cangkru'an adalah terminology yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Jawa Timur dan di lingkungan Arek pada umumnya (Surabaya dan Malang Raya) sebagai kegiatan bersosialisasi dalam forum yang sangat informal dan sangat cair. Cangkru'an biasanya dilakukan di pos ronda, warung kopi, taman, atau tempat tempat berkumpul masyarakat yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. BBPOM Surabaya mengadopsi konsep Cangkru'an menjadi layanan informasi interaktif antara BBPOM Surabaya dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dan sekaligus kesempatan untuk konsultasi terkait berbagai ketentuan dan peraturan perundang undangan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan Cangkru'an ini mendapat sambutan yang sangat menggembirakan dari masyarakat pelaku usaha maupun yang baru akan memulai berusaha. Selama Triwulan I tahun 2022, BBPOM Surabaya telah melaksanakan 5 kali kegiatan Cangkru'an dengan

jumlah total peserta 206. Topik yang disampaikan pada kegiatan Cangkru'an antara lain adalah : Tata cara Registrasi Pangan Olahan versi Baru, Label pada Pangan Olahan, Notifikasi Kosmetika, IP CPPOB.

Website BBPOM Surabaya terus ditingkatkan tampilan dan isinya sehingga mampu menjadi pilihan pertama bagi masyarakat yang ingin mencari informasi tentang Obat dan Makanan. Fitur FAQ telah ditambahkan pada website BBPOM Surabaya sehingga masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi. Selain website BBPOM Surabaya, media sosial resmi BBPOM Surabaya lainnya, misalnya Instagram, Twitter, Facebook diharapkan juga menjadi pelengkap bagi website BBPOM Surabaya sebagai sumber informasi. Semua media sosial ini diharapkan memuat informasi yang saling mengisi dan melengkapi sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang paripurna. Jika masyarakat masih membutuhkan informasi dalam rangka konfirmasi dan klarifikasi masih tersedia layanan telepon, email dan WhatsApp yang dapat diakses kapan saja.

Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial dan website BBPOM Surabaya harus ringkas, menarik dan up to date serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap waktu untuk menangkal informasi sampah/HOAKS yang banyak beredar di masyarakat. Sebagai instansi yang berbasis ilmiah terkadang BBPOM Surabaya menyampaikan informasi yang terlalu ilmiah dengan bahasa yang sangat ilmiah sehingga sulit dimengerti oleh masyarakat. Agent of Change BBPOM Surabaya yang terdiri dari kelompok milenial menjadi harapan bagi BBPOM Surabaya agar mampu membuat desain dan tampilan informasi di media sosial yang sederhana, menarik, informatif dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang kedua yaitu melalui pengukuran indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*reliability*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*empathy*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat. Pada tahun 2021 ini telah diterbitkan beberapa peraturan baru terkait perizinan di bidang Obat dan Makanan. Hal ini dapat dimungkinkan menjadi penyebab menurunnya Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang dikoordinasikan melalui system OSS membuat beberapa aplikasi milik BPOM yang selama ini telah berlangsung harus disesuaikan dan mengalami beberapa perubahan. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan pelaku usaha maupun petugas pelayanan publik BPOM terutama di UPT yang berhadapan langsung dengan masyarakat pelaku usaha. Sistem registrasi baru yang serba online dan tidak ada mekanisme offline mengakibatkan masyarakat pelaku usaha terutama UMKM yang pada umumnya mempunyai literacy digital yang rendah merasa kesulitan dan menganggap BPOM mempersulit proses perizinan. Terbatasnya layanan

konsultasi secara langsung juga dapat dianggap menjadi penyebab menurunnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM.

Berdasarkan hasil survey, aspek reliability yaitu kepuasan atas upaya pengawasan yang dilakukan BPOM merupakan aspek yang terendah, terutama pada katagori Obat Tradisional dan Kosmetik.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/Permasalahan	Kondisi pandemi Covid 19 menyebabkan beberapa kegiatan KIE dan konsultasi dilakukan secara daring/nir kontak. Hal ini mengakibatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan mengalami penurunan. Pengaduan masyarakat Sebagian tidak dapat ditindaklanjuti ke lapangan karena kondisi pandemi. Apalagi dengan diberlakukannya layanan melalui OSS dan e sertifikasi yang masih baru mengakibatkan kebingungan masyarakat.	Kondisi pandemi Covid 19 menyebabkan beberapa kegiatan KIE dan konsultasi dilakukan secara daring/nir kontak. Hal ini mengakibatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan mengalami penurunan. Pengaduan masyarakat Sebagian tidak dapat ditindaklanjuti ke lapangan karena kondisi pandemi. Apalagi dengan diberlakukannya layanan melalui OSS dan e sertifikasi yang masih baru mengakibatkan kebingungan masyarakat.	Kondisi pandemi Covid 19 menyebabkan beberapa kegiatan KIE dan konsultasi dilakukan secara daring/nir kontak. Hal ini mengakibatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan mengalami penurunan. Pengaduan masyarakat Sebagian tidak dapat ditindaklanjuti ke lapangan karena kondisi pandemi. Apalagi dengan diberlakukannya layanan melalui OSS dan e sertifikasi yang masih baru mengakibatkan kebingungan masyarakat.
Rekomendasi/Perbaikan	Dilakukan layanan tatap muka terbatas. Dilakukan layanan untuk masing masing konsumen menggunakan zoom.	Dilakukan layanan tatap muka terbatas. Dilakukan layanan untuk masing masing konsumen menggunakan zoom.	Layanan tatap muka dilakukan lebih banyak.
Rencana Aksi	Dilakukan layanan konsultasi melalui Zoom dalam Kegiatan Cangkrukan AMKM (Anda Menanyakan Kami Menjawab) untuk masing masing konsumen.	Mulai dilakukan layanan langsung di ruang ULPK dengan penjadwalan piket. Dilakukan layanan konsultasi melalui Zoom dalam Kegiatan Cangkrukan AMKM (Anda Menanyakan Kami Menjawab) untuk masing masing konsumen.	Dilakukan layanan penuh secara langsung di ruang ULPK. Pendampingan bagi pelaku usaha UMKM yang kesulitan mengisi aplikasi e sertifikasi.pom.go.id Dilakukan layanan konsultasi melalui Zoom dalam Kegiatan Cangkrukan AMKM (Anda Menanyakan Kami Menjawab) untuk masing masing konsumen.

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Belum ada layanan langsung. Belum ada layanan Cangkrukan AMKM.	Belum ada layanan langsung.	Belum ada pendampingan untuk UMKM dalam pengisian e sertifikasi.pom.go.id
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Dilakukan layanan konsultasi melalui Zoom dalam Kegiatan Cangkrukan AMKM (Anda Menanyakan Kami Menjawab) untuk masing masing konsumen.	Mulai dilakukan layanan langsung di ruang ULPK dengan penjadwalan piket. Dilakukan layanan konsultasi melalui Zoom dalam Kegiatan Cangkrukan AMKM (Anda Menanyakan Kami Menjawab) untuk masing masing konsumen.	Dilakukan layanan penuh secara langsung di ruang ULPK. Pendampingan bagi pelaku usaha UMKM yang kesulitan mengisi aplikasi e sertifikasi.pom.go.id Dilakukan layanan konsultasi melalui Zoom dalam Kegiatan Cangkrukan AMKM (Anda Menanyakan Kami Menjawab) untuk masing masing konsumen.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 23. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	-	-	-	-
Bulan Pebruari 2022	-	-	-	-
Bulan Maret 2022	-	-	-	-

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat sesuai PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di Surabaya terhadap penerima layanan informasi, penerima layanan Surat Keterangan Impor/Ekspor (SKI/SKE), dan

penerima layanan pengujian sampel pihak ketiga (lintas sektor). Data hasil survei diolah oleh Inspektorat Utama melalui aplikasi SAPA APIP.

Hingga triwulan I tahun 2022 belum ada realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM Surabaya.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-

Belum ada realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2022 sehingga belum dapat dibandingkan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2022 BBPOM di Surabaya akan dilakukan terhadap 3 (tiga) layanan dengan jumlah populasi dan responden pada tiap layanan sbb :

- Pengujian : 1 orang
- SKI/SKE : 76 orang
- Layanan Informasi dan Pengaduan : 261 orang

Selama masa pandemi covid 19 layanan dialihkan hampir semuanya melalui media sosial dan tidak ada interaksi langsung (nir kontak) dengan konsumen. Dibutuhkan kompetensi khusus bagi pemberi layanan untuk memberikan layanan secara daring (online) sehingga semua informasi yang diberikan dapat dipahami dengan mudah oleh konsumen. Belum lagi kemampuan konsumen yang berbeda beda dalam menggunakan peralatan/gadget komunikasi membuat mekanisme pemberian informasi tidak sepenuhnya dapat sampai kepada sebagian konsumen. Sebagian konsumen lebih memilih konsultasi tatap muka langsung, dimana mereka mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan jelas serta dapat melakukan klarifikasi langsung kepada pemberi layanan. Selain itu, para konsumen bahkan bisa minta didampingi mengisi aplikasi e sertifikasi, e registrasi, e bpom, e notifikasi atau Asrot jika menemui kesulitan saat mengisi di tempat kerja atau di rumah. Kehilangan hak istimewa dapat menyebabkan hasil survey Kepuasan Masyarakat menurun terutama di unsur kompetensi dan perilaku pelaksana layanan.

Demikian juga halnya dengan penanganan pengaduan masyarakat. Selain itu masyarakat tidak dapat melakukan pengaduan dengan datang langsung ke kantor BBPOM Surabaya karena pembatasan jumlah pengunjung ke BBPOM Surabaya.

Oleh karena itu sejak akhir Maret 2022 dengan berubahnya status PPKM Kota Surabaya menjadi level I, BBPOM Surabaya juga membuka layanan tatap muka secara langsung untuk memberikan layanan paripurna kepada masyarakat. Dan hal ini disambut dengan antusias oleh masyarakat.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	Pengaduan masyarakat Sebagian tidak dapat ditindaklanjuti ke lapangan karena kondisi pandemi. Diberlakukannya layanan sertifikasi sarana melalui OSS dan e sertifikasi yang masih baru mengakibatkan kebingungan masyarakat.	Belum ada layanan secara langsung. Masyarakat memerlukan pendampingan dalam rangka penerapan aplikasi e sertifikasi.	Kompetensi pemberi layanan perlu ditingkatkan dalam menangani pengaduan masyarakat.
Rekomendasi/Perbaikan	Dilakukan layanan tatap muka terbatas. Dilakukan layanan untuk masing masing konsumen menggunakan zoom. Peningkatan kompetensi petugas pelayan publik dalam melakukan komunikasi publik.	Dilakukan pendampingan untuk masing masing konsumen dalam menggunakan aplikasi e sertifikasi.	Dilaksanakan in house training complain handling.
Rencana Aksi	Dilakukan layanan tatap muka terbatas. Dilakukan layanan untuk masing masing konsumen menggunakan zoom dalam kegiatan AMKM.	Mengikuti pelatihan pelayanan prima. Dilakukan pendampingan UMKM dalam mengisi aplikasi e sertifikasi.	Mengikuti pelatihan PKP. Mengikuti pelatihan complain handling.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Belum ada layanan langsung. Belum ada layanan Cangkrukan AMKM. Kompetensi petugas pelayan publik kurang memadai.	Belum ada pendampingan UMKM.	Kompetensi petugas belum memadai dalam menangani keluhan pelanggan dan pendampingan UMKM.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Dilakukan layanan konsultasi melalui Zoom dalam Kegiatan Cangkrukan AMKM (Anda Menanyakan Kami Menjawab) untuk masing masing konsumen.	Mulai dilakukan layanan langsung di ruang ULPK dengan penjadwalan piket. Dilakukan layanan konsultasi melalui Zoom dalam Kegiatan Cangkrukan AMKM (Anda Menanyakan Kami Menjawab) untuk masing masing konsumen.	Dilakukan layanan penuh secara langsung di ruang ULPK. Pendampingan bagi pelaku usaha UMKM yang kesulitan mengisi aplikasi e sertifikasi.pom.go.id. Petugas yang lebih kompeten menangani pengaduan pelanggan.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh 7 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 25. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	91	73,91	81,22	Cukup
Bulan Pebruari 2022	91	55,8	61,32	Kurang
Bulan Maret 2022	91	98,44	108,18	Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan} = (A+B+C+D)/4$$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \times 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \times 100\%$$

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada triwulan I tahun 2022, Balai Besar POM di Surabaya telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 124 keputusan/rekomendasi dari 129 keputusan/rekomendasi yang diterima. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di TW IV mengalami sedikit peningkatan dari triwulan sebelumnya namun **telah mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 108,17 % dan mendapat kriteria “ **baik** ”.

b. **Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022**

Tabel 26. Perbandingan realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	98,44	108,18	Baik

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan hingga triwulan I tahun 2022 **telah mencapai** target akhir tahun 2022, dengan capaian kategori baik. Masih diperlukan upaya untuk mempertahankan realisasi hingga triwulan IV tahun 2022.

c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Pada triwulan I, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 95,33% , karena sampai jatuh tempo timeline masih ada surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya masih dalam proses. Dan oleh karena itu tetap secara rutin dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT tersebut. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT dan Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 100,0% karena BBPOM Surabaya sudah menindaklanjuti semua surat dari Pusat maupun dari pemangku kepentingan. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat memperoleh hasil 0 % karena belum ada surat rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang perlu tindak lanjut pusat.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan sarana di akhir Januari 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak segera dibuat surat tindak lanjut dari hasil pemeriksaan sarana Surat dari Pusat masuk di akhir Pebruari sehingga di bulan pebruari belum ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> Persentasi keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 95,33 %, belum bisa mencapai 100 %
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana 	<ul style="list-style-type: none"> Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana Mempercepat menindaklanjuti surat dari Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana 	<ul style="list-style-type: none"> Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana Percepatan menindaklanjuti surat pusat 	<ul style="list-style-type: none"> Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 73,91 %	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 78,02 % 	Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 98,44 %
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Pebruari Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 78,02 %	Kondisi Maret Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 98,44 %	Kondisi April -

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 27. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	69	270,00	391,30	Tidak dapat disimpulkan
Bulan Pebruari 2022	69	70,42	102,05	Baik
Bulan Maret 2022	69	61,905	89,72	Cukup

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder} = (A+B)/2$$

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM di Surabaya kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Pada triwulan I tahun 2022 Balai Besar POM di Surabaya telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 110 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 64 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya **belum mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 89,71 % dengan kriteria “ **Cukup** ”.

b. **Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022**

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	69	61,905	89,72	Cukup

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan hingga triwulan I tahun 2021 **belum mencapai** target tahun 2022 dengan capaian cukup. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2022.

c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada triwulan I tahun 2022, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 57,14 %, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor 66,67 %. Dari hasil tersebut, capaian persentasi rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha /lintas sector kurang dari target yang ditetapkan.

Persentasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan kurang dari target yang ditetapkan, disebabkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya belum mendapatkan feedback dari pelaku usaha dan lintas sector sampai jatuh tempo timelinenya.

Dengan rendahnya persentase capaian tersebut petugas BBPOM Surabaya akan berkirim surat kembali ke pelaku usaha dan lintas sector untuk mendapatkan feedback dari pelaku usaha dan lintas sector. Dan diharapkan dengan berkirim surat kembali ke pelaku usaha dan lintas sector itu akan meningkatkan capaian dari persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan

d. **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)**

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> Feedback dari pelaku usaha dan lintas sektor hasil pemeriksaan tahun 2021 diterima di awal tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Feedback dari pelaku usaha dan lintas sektor hasil pemeriksaan tahun 2021 diterima di awal tahun Pemeriksaan ke sarana sudah mulai dilakukan di akhir januari 	<ul style="list-style-type: none"> hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya belum mendapatkan feedback dari pelaku usaha dan lintas sector sampai jatuh tempo timelinenya.
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi terhadap pelaku usaha dan lintas sektor agar memberikan feedback tidak melewati timeline Monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sektor 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi terhadap pelaku usaha dan lintas sektor agar memberikan feedback tidak melewati timeline Monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sektor 	<ul style="list-style-type: none"> Berkirim surat kembali ke pelaku usaha dan lintas sector agar memberikan feedback Monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sektor
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sektor 	<ul style="list-style-type: none"> Monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sektor 	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan berkirim surat kembali ke pelaku usaha dan lintas sector
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 270 % 	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 70,42 % 	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 61,90 %
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Pebruari Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 70,42 %	Kondisi Maret Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 61,90 %	- Kondisi April

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 29. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan tepat waktu hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	98,5	97,97	99,46	Baik
Bulan Pebruari 2022	98,5	98,21	99,71	Baik
Bulan Maret 2022	98,5	96,09	97,55	Baik

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu :

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik ; dan Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga triwulan I tahun 2022 diperoleh dari 4.493 sertifikat yang diterbitkan tepat waktu dibandingkan dengan 4.676 sertifikat yang diterbitkan sehingga memperoleh hasil 96,09%. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 97,55% dengan kriteria **baik**.

b. **Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022**

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,5	96,09	97,55	Baik

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga triwulan I tahun 2022 belum mencapai target tahun 2022 dengan kriteria baik, dengan demikian perlu dilakukan upaya perbaikan berkesinambungan untuk mencapai target 2022.

c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kondisi pandemi yang masih terjadi pada triwulan I tidak menyebabkan pelaksanaan kegiatan sertifikasi/audit sarana baik produksi maupun distribusi secara *on site* menjadi berkurang. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi secara *on site* dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan terdapat beberapa sarana yang meminta hasil swab test PCR atau Antigen petugas yang akan melakukan audit ke perusahaan tersebut. Jika demikian, petugas juga meminta hal yang sama ke perusahaan tersebut.

Pelaksanaan pemeriksaan sarana secara *on site* lebih diutamakan karena banyak pelaku usaha yang kurang memahami penjelasan petugas melalui media daring dan pelaku usaha merasakan dampak yang lebih baik saat dilakukan pemeriksaan sarana secara *on site*. Pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama. Selain itu, petugas juga kesulitan melakukan pemeriksaan secara daring karena tidak dapat mengamati secara keseluruhan. Pelaksanaan audit sarana dalam rangka pemenuhan penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik pada triwulan I diprioritaskan untuk pelaku usaha industri menengah dan besar. Hal ini dikarenakan salah satu persyaratan penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik bagi usaha menengah besar dengan dilakukan audit terlebih dahulu sedangkan pelaksanaan audit sarana bagi usaha mikro kecil dilakukan saat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik telah terbit.

Sertifikasi CDOB pada triwulan I belum dapat dihitung dikarenakan proses CAPA yang masih terus berjalan hingga I tahun pelaksanaan anggaran. Sedangkan untuk penerbitan sertifikasi hasil pengujian pihak ketiga seluruhnya sesuai timeline. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen petugas dalam menyelesaikan seluruh tahapan pengujian pihak ketiga dan pengaturan waktu pengerjaan sampel secara tepat. Selain itu, jumlah sampel pihak ketiga mengalami penurunan dimungkinkan karena adanya kondisi pandemi.

Selama kondisi pandemi terdapat perubahan *timeline* SKI, yaitu bagi komoditi pangan menjadi 5 jam, komoditi obat dan kosmetik menjadi 2 jam. Kendala dalam pemenuhan perubahan *timeline* tersebut, antara lain:

- Terdapat gangguan sistem e-bpom pada jam kerja sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan waktu penerbitan (*timeline*) SKI / SKE
- Importir / eksportir tidak mengunggah dokumen yang lengkap dan benar sehingga terjadi penolakan oleh petugas saat evaluasi dokumen dan menyebabkan waktu penyelesaian dapat melebihi batas waktu.
- Sistem e-bpom belum dilengkapi dengan kode/penandaan terhadap pengajuan SKI/SKE yang telah mengalami penolakan pertama, kedua dan ketiga dari pengajuan sebelumnya. Hal ini penting bagi petugas evaluator agar dapat menjadi perhatian untuk dilakukan evaluasi kembali untuk pengajuan yang telah mengalami penolakan.
- Tidak terdapat notifikasi pada sistem e-bpom yang menunjukkan kepada konsumen bahwa dokumen yang masuk setelah jam 12 akan dikerjakan pada hari berikutnya. Hal ini menyebabkan importir / eksportir merasa bahwa evaluasi dokumen terlalu lama dan berdampak pada hasil survei kepuasan masyarakat.
- Terkait *timeline* yang telah ditetapkan tersebut, petugas BBPOM di Surabaya berusaha untuk dapat memenuhi dengan cara mengerjakan SKI penolakan, SKI komoditi pangan dan obat lebih dulu

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat eksportir / importir yang tidak memahami persyaratan SKE / SKI sehingga membutuhkan penilaian evaluasi dokumen yang lama/melebihi timeline • Pemenuhan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama • Pemenuhan persyaratan SPA (Surat Pemenuhan Aspek) CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap oleh UMKM membutuhkan waktu lama 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat eksportir / importir yang tidak memahami persyaratan SKE / SKI sehingga membutuhkan penilaian evaluasi dokumen yang lama/melebihi timeline • Masih terdapat pemenuhan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama • Masih terdapat pemenuhan persyaratan SPA (Surat Pemenuhan Aspek) CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap oleh UMKM membutuhkan waktu lama 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat eksportir / importir yang tidak memahami persyaratan SKE / SKI sehingga membutuhkan penilaian evaluasi dokumen yang lama/melebihi timeline • Masih terdapat pemenuhan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama • Masih terdapat pemenuhan persyaratan SPA (Surat Pemenuhan Aspek) CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap oleh UMKM membutuhkan waktu lama
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Menginformasikan kembali persyaratan SKE / SKI kepada eksportir / importir • Memberikan contoh dokumen dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menginformasikan kembali persyaratan SKE / SKI kepada eksportir / importir • Memberikan contoh dokumen dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menginformasikan persyaratan SKE / SKI kepada eksportir / importir • Memberikan contoh dokumen dan

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
	<p>menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap dan memberikan informasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB dan Sertifikasi CPOTB Bertahap 	<p>menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan Sertifikat CPOTB Bertahap dan memberikan informasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB dan Sertifikasi CPOTB Bertahap 	<p>menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan <i>Refreshment</i> Persyaratan SKE / SKI pada bulan Maret dan membentuk grup <i>whatsapp</i> pengguna layanan SKE / SKI • Mengadakan <i>desk consultation</i> penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala • Mengadakan pendampingan kepada pelaku UMKM Kosmetik dan Obat Tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan <i>Refreshment</i> Persyaratan SKE / SKI pada bulan Maret dan membentuk grup <i>whatsapp</i> pengguna layanan SKE / SKI • Mengadakan <i>desk consultation</i> penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan <i>Refreshment</i> Persyaratan SKE / SKI pada bulan Maret dan membentuk grup <i>whatsapp</i> pengguna layanan SKE / SKI • Mengadakan <i>desk consultation</i> penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala <p>Mengadakan Bimtek CPKB untuk UMKM Kosmetik dalam rangka Jatim Glowing pada bulan Maret</p>
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir • Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan masih rendah • Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB dan CPOTB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir/importir • Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan masih rendah • Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB dan CPOTB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan eksportir / importir • Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan masih rendah • Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<p>Kondisi Pebruari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan timeline penyelesaian evaluasi permohonan SKI/SKE • Pertanyaan ekportir / importir melalui grup WA dijawab secara cepat oleh petugas • Terdapat penambahan jumlah penerbitan IP CPPOB UMK Pangan • CAPA terkait dokumentasi CPKB dan CPOTB Bertahap bisa ditindaklanjuti oleh pemohon dengan lebih cepat 	<p>Kondisi Maret</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan timeline penyelesaian evaluasi permohonan SKI/SKE • Pertanyaan ekportir / importir melalui grup WA dijawab secara cepat oleh petugas • Terdapat penambahan jumlah penerbitan IP CPPOB UMK Pangan • CAPA terkait dokumentasi CPKB dan CPOTB Bertahap bisa ditindaklanjuti oleh pemohon dengan lebih cepat 	<p>Kondisi April</p> <p>-</p>

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 31. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	60	61,54	102,56	Baik
Bulan Pebruari 2022	60	52,08	86,81	Cukup
Bulan Maret 2022	60	50,98	84,97	Cukup

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

$$\frac{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawas Obat dan bahan Obat; Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; SOP Makro.

Hingga triwulan 1 tahun 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap 102 sarana produksi di wilayah Jawa Timur oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil 52 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 50 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk triwulan I adalah sebesar 50,98%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya sampai dengan triwulan I belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 84,97 % dengan kriteria “**CUKUP**”.

b. **Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022**

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	50,98	84,97	Cukup

Realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hingga triwulan I tahun 2022 belum mencapai target tahun 2022 dengan kriteria cukup. Perlu dilakukan perbaikan berkesinambungan agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada triwulan 1 dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi obat (Industri farmasi) sebanyak 3 sarana, dengan hasil 2 memenuhi ketentuan dan 1 tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi kosmetika sebanyak 12 sarana, dengan hasil 7 sarana memenuhi ketentuan dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi obat tradisional, IOT/IEBA sebanyak 3 sarana dengan hasil 2 sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan, sarana produksi suplemen Kesehatan sebanyak 2 sarana dengan hasil 1 sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan; sarana produksi UKOT sebanyak 7 sarana dengan hasil 4 sarana memenuhi ketentuan dan 3 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi UMOT sebanyak 1 sarana dengan hasil memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi pangan MD sebanyak 67 sarana dengan hasil 35 sarana memenuhi ketentuan dan 32 sarana tidak memenuhi ketentuan, dan pemeriksaan sarana produksi PIRT sebanyak 7 sarana dengan hasil tidak memenuhi ketentuan.

Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hingga triwulan I tahun 2022 belum mencapai target, hal ini dikarenakan pada triwulan I tahun 2022, focus pemeriksaan dilakukan terhadap sarana produksi yang belum pernah diperiksa dalam kurun waktu 3-5 tahun terakhir; pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan ranking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa; adanya pemeriksaan sarana sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat,

sehingga profil hasil pemeriksaan yang didapat adalah banyak sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan ceklis pemeriksaan produksi pangan dari form 166 menjadi form 68 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa petugas terpapar pandemic Covid-19 sehingga pemeriksaan tidak dilakukan selama beberapa pekan Penggunaan Daftar cek pemeriksaan (check-list) penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk IRT menggunakan formulir pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga dan formulir rincian ketidaksesuaian yang mengacu ke Peraturan Kepala Badan POM tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Kurangnya tenaga DFI dan PKP di Kabupaten/ Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat penundaan jadwal pemeriksaan sarana distribusi dan produksi terkait pemetaan kompetensi pegawai dan pengisian SKP di system SIMAKIN sehingga pemeriksaan terhenti selama kurang lebih 7 hari kerja Terdapat permintaan pendampingan pemeriksaan dari pusat dan penelusuran kasus namun tidak bisa diklaim sebagai kinerja balai
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi penggunaan ceklis pemeriksaan produksi pangan (form 68) kepada semua petugas 	<ul style="list-style-type: none"> Sterilisasi ruangan pemeriksaan Isoman untuk petugas yang terpapar dan kontak erat dengan pasien terkonfirmasi Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana Dilakukan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga DFI dan PKP di Kabupaten/ Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pengefektifan jadwal pemeriksaan terkait penelusuran kasus dan pendampingan pemeriksaan Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan sosialisasi KepKa BPOM No. HK.02.02.1.2.01.22.63 tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan dan Persamaan Persepsi Penilaian CPPOB (Form 68): Konstruksi dan Lay out pada 4 Maret 2022 	<ul style="list-style-type: none"> Tracing Covid-19 terhadap petugas, pemberian daya tahan tubuh Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana Dilakukan Pelaksanaan Kegiatan TOT PKP/ DFI pada bulan Maret dan April tahun 2022 sesuai dengan Surat Edaran Nomor B-PB.02.01.9.93.03.22.288 tanggal 18 Maret 2022 tentang Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Memprioritaskan target pemeriksaan rutin Target sarana pemeriksaan disusun oleh masing – masing kedeputian Meningkatkan Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
		Pelaksanaan Kegiatan TOT PKP/ DFI	
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Petugas tidak paham cara penggunaan ceklis pemeriksaan produksi pangan (form 68) sehingga pengisian form tersebut membutuhkan waktu yang lama dan tidak memenuhi target harian pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa petugas terkonfirmasi positif Covid-19 (sebanyak 4 orang petugas) Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko Kurangnya tenaga DFI dan PKP di Kabupaten/ Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa penelusuran kasus dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin Penetapan target sarana berdasarkan analisis risiko Kurangnya Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Petugas mulai memahami cara pengisian form 68 	<ul style="list-style-type: none"> Petugas dalam keadaan sehat dan dapat beraktifitas seperti sedia kala Progress Februari: Belum terdapat perubahan bermakna terhadap % capaian. Diharapkan % capaian dapat tercapai pada Maret 2022 	Progress April: -

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 33. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	62	55,88	90,13	Baik
Bulan Pebruari 2022	62	59,72	96,33	Baik
Bulan Maret 2022	62	57,46	92,68	Baik

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

$$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan

dan Mutu Pangan Olahan; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Surat Edaran Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.

Pada triwulan 1 tahun 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap 134 sarana distribusi di wilayah Jawa Timur oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil 77 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 57 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk triwulan I adalah sebesar 57,46%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya sampai dengan triwulan I **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 92,68 % dengan kriteria “baik”.

b. **Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022**

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	57,46	92,68	Baik

Realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hingga triwulan I tahun 2022 **belum mencapai** target tahun 2022 dengan kriteria Baik. Perlu dilakukan perbaikan berkesinambungan agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada triwulan 1 dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi dan pelayanan obat sebanyak 60 sarana dengan hasil 33 sarana memenuhi ketentuan dan 27 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan obat tersebut terdiri atas pemeriksaan pada GFK sebanyak 6 sarana dengan hasil 3 sarana memenuhi ketentuan dan 3 sarana tidak

memenuhi ketentuan; pemeriksaan pada sarana PBF sebanyak 22 sarana dengan hasil 17 sarana memenuhi ketentuan dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana apotek sebanyak 14 sarana dengan hasil 3 sarana memenuhi ketentuan dan 11 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana klinik sebanyak 5 sarana dengan hasil 2 sarana memenuhi ketentuan dan 3 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana puskesmas sebanyak 9 sarana dengan hasil 8 sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana took obat sebanyak 4 sarana dengan hasil tidak memenuhi ketentuan.

Selain tersebut diatas, pada triwulan 1 tahun 2022 juga dilakukan pemeriksaan distribusi obat tradisional, distribusi suplemen Kesehatan, distribusi kosmetika dan distribusi pangan sebanyak 74 sarana dengan hasil 44 sarana memenuhi ketentuan dan 30 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional meliputi pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional tk kesulitan 1 sebanyak 20 sarana dengan hasil 10 sarana memenuhi ketentuan dan 10 sarana tidak memenuhi ketentuan, dan pemeriksaan terhadap 1 importir obat tradisional dengan hasil tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi suplemen Kesehatan sebanyak 5 sarana dengan hasil 4 sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik sebanyak 28 sarana yang terdiri dari pemeriksaan took kosmetika sebanyak 23 sarana dengan hasil 19 memenuhi ketentuan dan 4 sarana tidak memenuhi ketentuan, dan pemeriksaan pada penotifikasi kosmetika sebanyak 5 sarana dengan hasil 1 sarana memenuhi ketentuan dan 4 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi pangan sebanyak 20 sarana yang terdiri dari pemeriksaan sarana distribusi pangan tk kesulitan 1 sebanyak 8 sarana dengan hasil 4 sarana memenuhi ketentuan dan 4 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana distribusi pangan tk kesulitan 2 sebanyak 9 sarana dengan hasil 5 sarana memenuhi ketentuan dan 4 sarana tidak memenuhi ketentuan, dan pemeriksaan sarana distribusi pangan tingkat kesulitan III sebanyak 3 sarana dengan hasil 1 sarana memenuhi ketentuan dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan.

Pada pemeriksaan distribusi pada tahun 2022 terdapat perubahan antara lain pada pemeriksaan rutin pada sarana penotifikasi kosmetika, dan pada pemeriksaan rutin pada sarana distribusi suplemen Kesehatan. Sebelumnya, pemeriksaan suplemen makanan di sarana distribusi dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, sedangkan pada tahun 2022, pemeriksaan sarana distribusi dilakukan baik pada sarana distribusi obat tradisional dan sarana distribusi suplemen Kesehatan.

Capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hingga triwulan I tahun 2022 belum mencapai target, hal ini dikarenakan pada triwulan I tahun 2022, focus pemeriksaan dilakukan terhadap sarana distribusi yang belum pernah diperiksa dalam kurun waktu 3-5 tahun terakhir, pemeriksaan sarana distribusi obat (PBF) yang telah mendapatkan sertifikasi CDOB secara desktop inspeksi, dan pemeriksaan terkait penelusuran kemungkinan diversi penyaluran obat sehingga profil hasil pemeriksaan yang didapat adalah banyak sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan. Jumlah pemeriksaan sarana pada TW I tahun 2022 tidak mencapai target, dimana target sarana distribusi yang diperiksa adalah 80 sarana, sedangkan realisasi pemeriksaan sarana distribusi adalah 76 sarana. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya perubahan target pemeriksaan, dimana pada tahun 2022 mulai dilakukan pemeriksaan terhadap sarana penotifikasi kosmetika; kondisi pandemic Covid-19 yang mengalami peningkatan pada bulan Februari sd Maret 2022 mengakibatkan penurunan kinerja pemeriksaan, hal ini dikarenakan beberapa petugas terpapar Covid-19 dan reschedule terhadap target pemeriksaan Rumah Sakit; adanya perubahan penggunaan form pemeriksaan untuk sarana distribusi pangan, yang pada Maret 2022 sudah mulai diberlakukan (Form 96).

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Diwajibkannya pemeriksaan pada sarana distribusi penotifikasi kosmetika, sedangkan petugas belum pernah melakukan pemeriksaan rutin pada sarana penotifikasi kosmetika • Beberapa data sarana penotifikasi kosmetika tidak update, alamat yang tercantum pada data based tidak lengkap, hanya berupa nama jalan / nama desa dan RT RWV saja, kontak person yang ada pada data based tidak dapat dihubungi sehingga memperlama waktu pencarian lokasi sarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa petugas terpapar pandemic Covid-19 sehingga pemeriksaan tidak dilakukan selama beberapa pekan • Penundaan pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan obat yang berpotensi menjadi tempat penularan covid-19 (RS) • Target pemeriksaan sarana RS tidak terpenuhi • Desktop inspeksi untuk sarana RS tidak dilakukan dikarenakan tinggi nya angka pasien terkonfirmasi Covid-19 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat penundaan jadwal pemeriksaan sarana distribusi dan produksi terkait pemetaan kompetensi pegawai dan pengisian SKP di system Simakin sehingga pemeriksaan terhenti selama kurang lebih 7 hari kerja • Terdapat pendampingan pemeriksaan dari pusat dan penelusuran kasus (penelusuran kemungkinan diversi obat di PBF dan di beberapa apotek) • Penundaan pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan obat yang berpotensi menjadi tempat penularan covid-19 (RS) • Target pemeriksaan sarana RS tidak terpenuhi • Desktop inspeksi untuk sarana RS tidak dilakukan dikarenakan tinggi nya angka pasien terkonfirmasi Covid-19

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
			<ul style="list-style-type: none"> Perubahan form pemeriksaan sarana distribusi pangan sesuai SMKPO Pengklasifikasian pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional dan suplemen Kesehatan yang semula diperiksa bersamaan menjadi diperiksa per sarana distribusi
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi ceklist pemeriksaan sarana penotifikasi kosmetika Menyampaikan keluhan terkait ketidaklengkapan alamat sarana penotifikasi kosmetika kepada ke deputian 2 	<ul style="list-style-type: none"> Sterilisasi ruangan pemeriksaan Isoman untuk petugas yang terpapar dan kontak erat dengan pasien terkonfirmasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pengefektifan jadwal pemeriksaan terkait penelusuran kasus dan pendampingan pemeriksaan Sosialisasi penggunaan form pemeriksaan distribusi pangan sesuai SMKPO Sosialisasi terkait Teknik pemeriksaan di sarana distribusi suplemen Kesehatan
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> dilakukan sosialisasi pemeriksaan penotifikasi kosmetika pada Akhir Januari 2022 	<ul style="list-style-type: none"> Tracing Covid-19 terhadap petugas Pemeriksaan sarana RS ditunda sampai kondisi memungkinkan 	<ul style="list-style-type: none"> Memprioritaskan target pemeriksaan rutin Akan dilakukan percepatan pemeriksaan sarana produksi menjelang akhir tahun
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa petugas mengalami kesulitan pada saat pemeriksaan sarana penotifikasi (terkait kesesuaian data informasi produk (DIP)) 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa petugas terkonfirmasi positif Covid-19 (sebanyak 4 orang petugas) 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa penelusuran kasus dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi Feb: Pemeriksaan penotifikasi kosmetika mulai berjalan lancar, petugas mulai memahami alur dan titik kritis pemeriksaan sarana penotifikasi kosmetika 	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi Maret: Beberapa petugas dinyatakan negative Covid-19 dan dapat beraktifitas seperti sedia kala 	<ul style="list-style-type: none"> Progress April: -

6. Indeks Pelayanan Publik

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 35. Realisasi Indeks Pelayanan Publik hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	-	-	-	-
Bulan Pebruari 2022	-	-	-	-
Bulan Maret 2022	-	-	-	-

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori nilai

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Hingga triwulan I tahun 2022 belum diperoleh Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dari Tim Penilai UPP pusat.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pelayanan Publik	4,45	-	-	-

Realisasi indeks pelayanan publik hingga triwulan I tahun 2022 **belum ada**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Dari hasil penilaian Unit Pelayanan Publik tahun 2021 yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik 4,52 bagi BBPOM

di Surabaya menunjukkan lompatan yang sangat besar jika dibandingkan hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2020 sebesar 4,11. Belajar dari rendahnya nilai IPP tahun 2020 bahkan turun dari nilai IPP tahun 2019, BBPOM Surabaya melakukan berbagai upaya sesuai aspek penilaian indeks pelayanan publik terutama yang masih belum optimal, antara lain sbb :

- Melakukan penyusunan Standar Pelayanan Publik dengan melibatkan berbagai unsur dan profesi antara lain pelaku usaha yang diwakili oleh GP Farmasi, Perkosmi, GAPMMI, akademisi diwakili oleh Universitas Airlangga dan Universitas Surabaya, YLKI sebagai perwakilan suara konsumen, komunitas masyarakat diwakili antara lain oleh Pramuka, Muslimat, Fatayat, dll, lintas sektor terkait antara lain dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dll
- Melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik melalui Pendidikan dan Pelatihan, termasuk peningkatan *soft skill* pelayanan publik.
- Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat mandiri secara periodik untuk melihat respon pelanggan terhadap pelayanan publik yang diberikan
- Meningkatkan fasilitas pelayanan publik sehingga pelanggan merasa nyaman dan mendapatkan semua yang dibutuhkan.
- Memberikan reward kepada petugas pemberi layanan.
- Meningkatkan responsive waktu pelayanan lebih cepat.
- Melakukan pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik secara terus menerus.
- Memperbaiki dokumentasi proses penanganan pengaduan sehingga tertib dan mudah diakses.
- Menyediakan berbagai macam alternatif pelayanan publik yang dapat diakses oleh konsumen yang memiliki berbagai latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi, demografi, dll. Prinsip dalam pelayanan publik adalah *no one left behind*, semua harus mendapat layanan yang sama.
- Menerapkan kode etik pelaksana layanan meliputi hak, kewajiban, larangan KKN dan larangan diskriminasi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM Surabaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan di lingkungan BBPOM Surabaya untuk memberikan kepastian bagi pemberi layanan dan penerima layanan berusaha dipenuhi oleh BBPOM

Surabaya, bahkan beberapa hal dapat dipenuhi dengan sangat baik oleh BBPOM Surabaya misalnya timeline untuk rekomendasi SKI dan SKE. Sedangkan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pemberi layanan dilakukan peningkatan kompetensi SDM secara terencana dan terstruktur. Mengantisipasi lingkungan strategis yang semakin dinamis (VUCA) diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi paripurna dalam memberikan layanan. Kebutuhan SDM secara kuantitas sebagian dapat digantikan dengan pemanfaatan Sistem Informasi yang dapat mempercepat layanan, memberikan layanan yang konsisten, transparan dan akuntabel. Sistem informasi yang dikembangkan BBPOM Surabaya ditujukan untuk memberikan kemudahan dan transparansi serta kepastiaan kepada pelanggan. Telah dikembangkan *tracking system* untuk layanan pengujian pihak ketiga yaitu SURAMADU (Telusur Sampel Pihak Ketiga Terpadu) sehingga konsumen mengetahui dengan pasti status progress sample yang sedang diuji di laboratorium BBPOM Surabaya. Selain itu BBPOM di Surabaya juga telah mengembangkan berbagai aplikasi untuk memudahkan pelayanan publik misalnya : **Laskar** (Sistem Informasi Layanan Surat Keterangan Ahli Bagi Polisi), **Cangkrukan** (Bincang dengan Kru Layanan), AMKM Anda Menanyakan Kami Menjawab, **Pinarak Rek, Serasi** (Sistem Informasi Registrasi dan Sertifikasi), dan **Gempur Jatim** (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), **SiPPOTra** (Sinergitas Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional), dan **Sketsa** (Surat Keterangan Ekspor Terbit Satu Hari Saja)

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/Permasalahan	Belum tersedia Standar Pelayanan Publik yang terkini.	Kompetensi dan persepsi petugas pemberi layanan publik belum sama.	Inovasi yang telah dibangun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik.
Rekomendasi/Perbaikan	Segera disusun Standar Pelayanan Publik terkini berdasarkan peraturan perundang undangan yang ada.	Disusun jadwal sharing knowledge dan pelatihan secara terstruktur untuk petugas layanan publik.	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan inovasi inovasi layanan publik.
Rencana Aksi	Membentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik. Menyusun draft Standar Pelayanan Publik.	Melaksanakan sharing session setiap hari Rabu (morning breeze).	Monev inovasi pelayanan publik.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	-	-	-
Kondisi Setelah Rencana Aksi	-	Telah terbentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik.	Melaksanakan sharing session setiap hari Rabu (morning breeze) membahas isu isu terkini dan sharing knowledge.

7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 37. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	16	4,51	28,19	Sangat Kurang
Bulan Pebruari 2022	25	12,46	49,84	Sangat Kurang
Bulan Maret 2022	33	37,255	112,89	Sangat Baik

Persentase UMKM binaan yang memenuhi standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar} = (A + B + C)/3$$

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Ruang Lingkup UMKM : UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya; UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai; UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B); 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); 3)

Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor) ; Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Pada triwulan 1 telah diterbitkan 22 Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, 3 rekomendasi penerbitan sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik Bertahap, 3 rekomendasi Surat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik. Persentase progress tahapan pendampingan UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik pada triwulan 1 sebesar 37,81% sehingga didapatkan capaian Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik sebesar 114,58% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. **Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022**

Tabel 38. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik	100	37,255	37,255	Sangat Kurang

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik hingga triwulan I tahun 2022 **belum mencapai** target tahun 2022. Target tahun 2022 adalah 60% UMKM yang memenuhi standar atau 100% progress tahapan sudah dilaksanakan. Pemantauan tiap bulan dilaksanakan berdasarkan progres tahapan pendampingan UMKM, bukan UMKM yang memenuhi standar.

c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada triwulan I, diperoleh capaian lebih dari 100% disebabkan oleh pendampingan yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Surabaya secara intensif kepada pelaku usaha. Dengan dilaksanakan bimtek, pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan pemenuhan dokumen persyaratan dan ketentuan terkait sarana produksi pangan, obat tradisional dan kosmetik menjadi meningkat. Bimbingan teknis dan pendampingan intensif sangat diperlukan oleh pelaku usaha agar dapat segera memenuhi persyaratan sehingga izin edar dapat segera diperoleh.

Meskipun capaian melebihi target, masih terdapat sarana usaha mikro kecil yang belum memenuhi persyaratan dan memerlukan waktu lebih lama untuk memperbaiki sarana produksi serta mempersiapkan dokumen terkait pemenuhan cara produksi yang baik dan dokumen administrasi yang diwajibkan sebagai persyaratan pengajuan pendaftaran produk. Hal ini disebabkan oleh permasalahan internal / kendala ekonomi pada pelaku usaha

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemahaman terhadap persyaratan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan dan CPPOB masih rendah ● Pemahaman pelaku UMKM Obat Tradisional terhadap persyaratan SKPA CPOTB Bertahap masih rendah ● Pemahaman pelaku UMKM Kosmetik terhadap persyaratan SPA CPKB masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemahaman terhadap persyaratan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan dan CPPOB masih rendah ● Pemahaman pelaku UMKM Obat Tradisional terhadap persyaratan SKPA CPOTB Bertahap masih rendah ● Pemahaman pelaku UMKM Kosmetik terhadap persyaratan SPA CPKB masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemahaman terhadap persyaratan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan dan CPPOB masih rendah ● Pemahaman pelaku UMKM Obat Tradisional terhadap persyaratan SKPA CPOTB Bertahap masih rendah ● Pemahaman pelaku UMKM Kosmetik terhadap persyaratan SPA CPKB masih rendah
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> ● Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif ● Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif ● Memberikan contoh dokumen untuk 	<ul style="list-style-type: none"> ● Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif ● Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif ● Memberikan contoh dokumen untuk 	<ul style="list-style-type: none"> ● Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif ● Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
	<p>pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB, serta melakukan pendampingan secara intensif</p>	<p>pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB, serta melakukan pendampingan secara intensif</p>	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB, serta melakukan pendampingan secara intensif
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan, mengadakan <i>desk consultation</i> penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala dan Bimtek IP CPPOB di bulan April Melakukan pendampingan UMKM Obat tradisional dan mengadakan Bimtek CPOTB Bertahap untuk UMKM Obat Tradisional pada bulan April Melakukan pendampingan UMKM kosmetik dan mengadakan Bimtek CPKB untuk UMKM Kosmetik dalam rangka Jatim Glowing pada bulan Maret 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan, mengadakan desk <i>consultation</i> penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala dan Bimtek IP CPPOB di bulan April Melakukan pendampingan UMKM Obat tradisional dan mengadakan Bimtek CPOTB Bertahap untuk UMKM Obat Tradisional pada bulan April Melakukan pendampingan UMKM kosmetik dan mengadakan Bimtek CPKB untuk UMKM Kosmetik dalam rangka Jatim Glowing pada bulan Maret 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan, mengadakan desk <i>consultation</i> penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gempur Jatim secara berkala dan Bimtek IP CPPOB di bulan April Melakukan pendampingan UMKM Obat tradisional dan mengadakan Bimtek CPOTB Bertahap untuk UMKM Obat Tradisional pada bulan April Melakukan pendampingan UMKM kosmetik
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan terhadap persyaratan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama Pemenuhan terhadap persyaratan SKPA CPOTB Bertahap oleh UMKM Obat tradisional membutuhkan waktu lama Pemenuhan terhadap persyaratan SPA CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan terhadap persyaratan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama Pemenuhan terhadap persyaratan SKPA CPOTB Bertahap oleh UMKM Obat tradisional membutuhkan waktu lama Pemenuhan terhadap persyaratan SPA CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan terhadap persyaratan IP CPPOB oleh UMK pangan olahan membutuhkan waktu lama Pemenuhan terhadap persyaratan SKPA CPOTB Bertahap oleh UMKM Obat tradisional membutuhkan waktu lama Pemenuhan terhadap persyaratan SPA CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<p>Kondisi Pebruari</p> <ul style="list-style-type: none"> Diterbitkan beberapa IP CPPOB UMK Pangan Terdapat UMKM Obat tradisional memperoleh rekomendasi SKPA CPOTB Bertahap Terdapat UMKM Kosmetik memperoleh rekomendasi SPA CPKB 	<p>Kondisi Maret</p> <ul style="list-style-type: none"> Diterbitkan beberapa IP CPPOB UMK Pangan Terdapat UMKM Obat tradisional memperoleh rekomendasi SKPA CPOTB Bertahap Terdapat UMKM Kosmetik memperoleh rekomendasi SPA CPKB 	<p>Kondisi April</p> <p>-</p>

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 39. Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	-	-	-	-
Bulan Pebruari 2022	-	-	-	-
Bulan Maret 2022	92,92	98,07	105,54	Baik

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;*
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;*
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;*
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan*

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisisioner dan online survei.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). BBPOM di Surabaya memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial.

BBPOM di Surabaya melaksanakan Survei Efektifitas KIE hingga triwulan tahun 2022 dengan jumlah responden mencapai 33 orang (responden minimal 30 orang tiap triwulan). Survei dilaksanakan

terhadap responden yang telah menerima kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dari BBPOM di Surabaya dalam berbagai metode mulai dari KIE secara tatap muka langsung bersama Tokoh Masyarakat, melalui webinar atau Zoom Meeting misalnya kegiatan Cangkrū'an, sosialisasi kepada mahasiswa dan komunitas ibu-ibu PKK dan kelompok masyarakat lainnya, KIE melalui media sosial Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dll.

Capaian Tingkat efektifitas KIE BBPOM Surabaya **telah berhasil mencapai target** yaitu 105,54% dengan kriteria **baik**.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,92	98,07	105,54	Baik

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2022 **telah mencapai** target akhir tahun 2022. Hal ini perlu dipertahankan hingga triwulan IV.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan triwulan I tahun 2022 BBPOM di Surabaya telah melaksanakan sebanyak 14 kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI di Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Bojonegoro, dan Surabaya dengan peserta kurang lebih sebanyak 250 orang di tiap titik lokasi. Selain itu BBPOM Surabaya juga melaksanakan berbagai kegiatan KIE antara lain kegiatan Cangkrū'an yaitu kegiatan Webinar interaktif antara pemberi informasi dan penerima informasi menggunakan platform Zoom Meeting yang telah dilaksanakan sebanyak 5 kali masing masing diikuti oleh 25 sampai 40 peserta dengan total 206 peserta. Kegiatan Cangkrū'an ini dilaksanakan berdasarkan jadwal rutin yang telah ditetapkan maupun dalam rangka memenuhi permintaan komunitas tertentu misalnya komunitas UMKM atau lintas sektor tertentu. BBPOM Surabaya juga menjadi narasumber pada berbagai kegiatan penyebaran informasi/penyuluhan/bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh lintas sektor di kabupaten/kota se Jawa Timur. Media sosial dan media cetak juga menjadi sarana bagi BBPOM Surabaya untuk menyebarkan informasi tentang Obat dan Makan terutama yang sesuai dengan isu yang sedang banyak terjadi di masyarakat. BBPOM Surabaya harus peka akan kebutuhan informasi masyarakat. Media yang dipilihpun menjadi penentu apakah pesan yang ingin disampaikan sampai secara efektif atau tidak kepada masyarakat.

Bergerak dari hasil survey pada triwulan I tahun 2022 ini harus menjadi kajian dan masukan bagi BBPOM di Surabaya untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekwensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai. Pemilihan topik juga harus menjadi pertimbangan, demikian juga sarana atau media yang akan dipakai serta bagaimana mengemas kegiatan KIE agar lebih menarik. Dari hasil Survey Kesadaran Masyarakat dan Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 yang belum mencapai target yang ditetapkan, BBPOM Surabaya harus bekerja lebih keras untuk menjangkau masyarakat di seluruh pelosok wilayah dengan berbagai media informasi dan komunikasi yang lebih friendly dan lebih dekat dengan masyarakat. Masyarakat perkotaan yang akrab dengan gawai mungkin lebih mudah menerima informasi melalui berbagai media sosial, namun masyarakat pedesaan dengan Pendidikan rendah dan pekerjaan di sektor pertanian mungkin lebih akrab dengan media radio dan televisi. Hal ini harus menjadi pertimbangan BBPOM Surabaya dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/Permasalahan	Kegiatan KIE belum dilaksanakan di seluruh wilayah kerja BBPOM Surabaya.	Metode KIE belum memanfaatkan media sosial dan media elektronik secara maksimal.	BBPOM Surabaya belum memanfaatkan komunitas masyarakat yang ada.
Rekomendasi/Perbaikan	KIE dilakukan secara merata di seluruh wilayah kerja BBPOM Surabaya.	KIE seharusnya memanfaatkan media sosial untuk generasi milenial dan media cetak dan elektronik untuk kelompok masyarakat yang lebih senior.	Agar digalang kembali komitmen kader kader masyarakat yang telah dibentuk. Dilakukan koordinasi dan komunikasi secara formal tetapi rutin dan konsisten untuk memelihara komitmen para kader.
Rencana Aksi	Membuat perencanaan KIE di luar daerah pilihan Tokoh masyarakat. Jika tersedia sisa anggaran dapat dilaksanakan di daerah daerah yang telah direncanakan tersebut.	Menyusun Kerjasama dengan Komisi Penyiaran Daerah untuk memanfaatkan media yang ada sebagai sarana untuk memperluas penyebaran informasi ke seluruh masyarakat.	Menjalin komunikasi dengan para kader. Membagikan informasi kepada para kader untuk diteruskan kepada komunitas anggotanya.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	KIE yang dilaksanakan baru secara online yaitu Cangkruan.	Metode KIE belum memanfaatkan media sosial dan media elektronik secara maksimal.	BBPOM Surabaya belum memanfaatkan komunitas masyarakat yang ada.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Di bulan maret di laksanakan 14 kegiatan KIE bersama Tokoh	Draft Perjanjian Kerjasama telah disampaikan kepada KPID Jawa Timur.	Mulai dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan

	Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI di Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Bojonegoro, dan Surabaya		komunitas komunitas yang telah dibentuk.
--	--	--	--

2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 41. Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	-	-	-	-
Bulan Pebruari 2022	5	3,33	66,60	Kurang
Bulan Maret 2022	15	10,00	66,67	Kurang

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI dan SMP/MTS, di 6 Kabupaten/Kota yaitu Kota Batu, Kabupaten Tuban, Kota Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Ponorogo. Target tahun 2022 adalah 34 sekolah baru dan 42 sekolah pengawalan yang merupakan target intervensi tahun 2021.

Hingga akhir triwulan I tahun 2022, progres program PJAS yang telah dilaksanakan adalah audiensi ke 5 Kabupaten/Kota yaitu Kota Batu, Kabupaten Tuban, Kota Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lamongan serta advokasi ke 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Batu, Kota Probolinggo dan Kabupaten Lamongan. Capaian jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 66,67%, dengan kriteria **kurang**.

b. **Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022**

Tabel 42. Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	100%	10%	10	Sangat Kurang

Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman hingga triwulan I tahun 2022 **belum mencapai** target tahun 2022 dengan kriteria sangat kurang karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2022.

c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Program Pengawasan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2022 akan dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 6 pasar, 9 desa dan 34 sekolah yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll.

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas

Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survey pasar dan sekolah. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk melakukan pengujian sederhana kitana bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan menggunakan tes kit. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM Surabaya. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa, Pasar atau Sekolah yang lain.

Pada tahap akhir kegiatan Pengawasan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS), akan dilakukan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman terhadap 76 sekolah yang terdiri dari 42 sekolah target intervensi tahun 2021 dan 34 sekolah target intervensi tahun 2022. Sertifikasi dilakukan untuk melihat komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan di sekolah. Verifikasi dilakukan oleh petugas BBPOM Surabaya. Dalam rangkaian sertifikasi sekolah dengan PJAS aman dilakukan sampling dan pengujian pangan jajanan anak sekolah yang disediakan di kantin maupun penjaja PJAS di sekitar sekolah. Sampling dilakukan terhadap pangan jajanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya formalin, boraks, rodhamin B dan Methanil yellow. Pengujian dilakukan menggunakan Test Kit Bahan Berbahaya. Secara umum terjadi penurunan persentasi pangan jajanan yang mengandung bahan berbahaya sebelum dan sesudah intervensi.

Kondisi pandemi Covid 19 merupakan kendala terbesar pelaksanaan program Pengawasan Pangan Jajanan yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah karena kegiatan pembelajaran terpaksa dialihkan secara daring sehingga seluruh kantin sekolah tidak beroperasi bahkan pada saat pembelajaran telah dilakukan secara tatap muka sebagian besar kantin sekolah juga tetap tutup. Diharapkan pada tahun 2022 ini kondisi pandemi semakin melandai dan berubah menjadi endemi sehingga seluruh kegiatan dapat dilakukan secara luring/tatap muka langsung.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/Permasalahan	-	Audiensi dengan Kepala Daerah tidak sesuai jadwal sehingga tahapan kegiatan selanjutnya tertunda.	Advokasi belum dilaksanakan sehingga belum dapat ditentukan lokus kegiatan.
Rekomendasi/Perbaikan	-	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk penjadwalan audiensi dengan Kepala Daerah.	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk penjadwalan pelaksanaan advokasi.
Rencana Aksi	-	Audiensi dilaksanakan segera setelah mendapatkan jadwal Kepala Daerah.	Advokasi dilaksanakan setelah disepakati waktu dengan OPD dan BBPOM Surabaya.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	-	Belum terlaksana audiensi	-
Kondisi Setelah Rencana Aksi	-	Audiensi terlaksana di 2 Kota yaitu Batu dan Probolinggo.	Audiensi terlaksana di Kabupaten Tuban, Kota Mojokerto dan Kabupaten Lamongan. Advokasi terlaksana di Kota Batu, Kota Probolinggo dan Kabupaten Lamongan.

3. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 43. Jumlah desa pangan aman hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	-	-	-	-
Bulan Pebruari 2022	5	3,33	66,60	Kurang
Bulan Maret 2022	15	10,00	66,67	Kurang

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi kewanamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis

komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Hingga akhir triwulan I tahun 2022, progres program Desa Pangan Aman yang telah dilaksanakan adalah audiensi ke 5 Kabupaten/Kota yaitu Kota Batu, Kabupaten Tuban, Kota Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lamongan serta advokasi ke 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Batu, Kota Probolinggo dan Kabupaten Lamongan. Capaian jumlah desa pangan aman **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 66,67%, dengan kriteria kurang.

b. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024**

Tabel 44. Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman	100%	10%	10	Sangat kurang

Realisasi jumlah desa pangan aman hingga triwulan I tahun 2022 **belum mencapai** target tahun 2022 dengan kriteria sangat kurang karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2022.

c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2022 akan dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 6 pasar, 9 desa dan 34 sekolah yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya akan melakukan intervensi dan pendampingan

kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll.

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survey pasar dan sekolah. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk melakukan pengujian sederhana kitana bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan menggunakan tes kit. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM Surabaya. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa, Pasar atau Sekolah yang lain.

Kondisi pandemi Covid 19 merupakan kendala terbesar pelaksanaan program Desa Pangan Aman. Berkaca dari pelaksanaan program yang sama pada tahun 2021, kegiatan bimbingan teknis kepada

kader kurang efektif jika dilaksanakan secara daring. Hal ini nampak pada tahapan tahapan berikutnya, kader nampak bingung dan tidak yakin dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Diharapkan pada tahun 2022 ini kondisi pandemi semakin melandai dan berubah menjadi endemi sehingga seluruh kegiatan dapat dilakukan secara luring/tatap muka langsung sehingga para kader dapat memahami sepenuhnya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/Permasalahan	-	Audiensi dengan Kepala Daerah tidak sesuai jadwal sehingga tahapan kegiatan selanjutnya tertunda.	Advokasi belum dilaksanakan sehingga belum dapat ditentukan lokus kegiatan.
Rekomendasi/Perbaikan	-	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk penjadwalan audiensi dengan Kepala Daerah.	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk penjadwalan pelaksanaan advokasi.
Rencana Aksi	-	Audiensi dilaksanakan segera setelah mendapatkan jadwal Kepala Daerah.	Advokasi dilaksanakan setelah disepakati waktu dengan OPD dan BBPOM Surabaya.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	-	Belum terlaksana audiensi	-
Kondisi Setelah Rencana Aksi	-	Audiensi terlaksana di 2 Kota yaitu Batu dan Probolinggo.	Audiensi terlaksana di Kabupaten Tuban, Kota Mojokerto dan Kabupaten Lamongan. Advokasi terlaksana di Kota Batu, Kota Probolinggo dan Kabupaten Lamongan.

4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 45. Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	-	-	-	-
Bulan Pebruari 2022	5	3,33	66,60	Kurang
Bulan Maret 2022	28	10,00	35,71	Sangat Kurang

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah pasar mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas dan Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar ercontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan

pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Hingga akhir triwulan I tahun 2022, progres program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang telah dilaksanakan adalah audiensi ke 5 Kabupaten/Kota yaitu Kota Batu, Kabupaten Tuban, Kota Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lamongan serta advokasi ke 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Batu, Kota Probolinggo dan Kabupaten Lamongan. Capaian jumlah pasar aman dari bahan berbahaya **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 35,71%, dengan kriteria **sangat kurang**.

b. **Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022**

Tabel 46. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100%	10%	10	Sangat Kurang

Realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya hingga triwulan I tahun 2022 **belum mencapai** target tahun 2022 dengan kriteria sangat kurang karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2022.

c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Program Pasar Aman Berbasis Komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2022 akan dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa

Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 6 pasar, 9 desa dan 34 sekolah yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya.

Seharusnya pada triwulan I telah dilakukan audiensi, advokasi dan survey pasar. Namun karena advokasi belum dilaksanakan di semua kabupaten/kota, maka kegiatan survey pasar tertunda. Kendala lain adalah Kota Batu yang merupakan salah satu target intervensi sedang melakukan renovasi satu satunya pasar yang ada di kota Batu. Hal ini baru diketahui pada saat audiensi dengan Walikota Batu. Pasar yang direnovasi baru akan selesai pada tahun 2023.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/Permasalahan	-	Audiensi dengan Kepala Daerah tidak sesuai jadwal sehingga tahapan kegiatan selanjutnya tertunda.	Advokasi belum dilaksanakan sehingga belum dapat ditentukan lokus kegiatan.
Rekomendasi/Perbaikan	-	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk penjadwalan audiensi dengan Kepala Daerah.	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk penjadwalan pelaksanaan advokasi.
Rencana Aksi	-	Audiensi dilaksanakan segera setelah mendapatkan jadwal Kepala Daerah.	Advokasi dilaksanakan setelah disepakati waktu dengan OPD dan BBPOM Surabaya.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	-	Belum terlaksana audiensi	-
Kondisi Setelah Rencana Aksi	-	Audiensi terlaksana di 2 Kota yaitu Batu dan Probolinggo.	Audiensi terlaksana di Kabupaten Tuban, Kota Mojokerto dan Kabupaten Lamongan. Advokasi terlaksana di Kota Batu, Kota Probolinggo dan Kabupaten Lamongan.

Sasaran Strategis 6
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 47. Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	-	3,46	-	-
Bulan Pebruari 2022	5	10,46	209,23	Tidak dapat disimpulkan
Bulan Maret 2022	13	19,55	150,42	Tidak dapat disimpulkan

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 19,55%. Dari 706 sampel yang disampling, seluruhnya telah diperiksa dan sebanyak 294 sampel telah selesai diuji sesuai dengan standar. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar **melampaui target** yang ditetapkan yaitu 150,45% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 48. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	19,55	19,55%	Sangat Kurang

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 19,55% **belum mencapai** target tahun 2022 dengan kriteria sangat kurang. Pada triwulan I memang ditargetkan presentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 13%, dengan capaian 19,55% sudah melebihi target untuk TW I. Diharapkan triwulan-triwulan berikutnya dapat memenuhi target sehingga target kumulatif dalam setahun dapat tercapai.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar anggaran hingga triwulan I tahun 2022 yang sudah jauh melampaui target. Capaian yang terlalu tinggi disebabkan oleh rendahnya target, karena perencanaan target yang ditetapkan di awal tahun belum memperhitungkan kemampuan sampling dan uji Balai/Balai Besar dan Loka dalam satu region terkait program regionalisasi laboratorium.

Regionalisasi Laboratorium adalah pengelompokan Balai Besar/Balai POM berdasar kriteria kedekatan letak geografis antar Balai, kemudahan transportasi, kemampuan pengujian, dan kemudahan akses jaringan internet. Balai Besar POM di Surabaya merupakan Balai Penguji Spesifik dalam Region 7 yang dikoordinatori Balai Besar POM di Denpasar dengan anggota antara lain : BB/Balai POM di Denpasar, Surabaya, Mataram, Kupang dan Loka Buleleng, Kediri, Jember, Bima, Manggarai Barat dan Ende.

Regionalisasi laboratorium diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengujian dan efisiensi sumber daya dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM serta mendukung daya saing produk obat dan makanan. Manfaat yang diharapkan dari regionalisasi laboratorium antara lain Efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan hal hal terkait laboratorium, serta mengurangi waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.

Banyak hal yang harus dipenuhi oleh laboratorium terkait regionalisasi, diantaranya alat, suku cadang, reagen dan kompetensi penguji, terutama bagi Balai spesifik seperti BBPOM di Surabaya, yang menguji parameter-parameter dengan menggunakan alat dengan berteknologi

tinggi seperti LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS. Hal yang harus dipenuhi diantaranya suku cadang, reagen dan kompetensi penguji. Sebelumnya frekuensi penggunaan alat-alat berteknologi tinggi di laboratorium cukup rendah, dengan adanya regionalisasi laboratorium frekuensi penggunaan akan meningkat dan membutuhkan reagen dengan grade khusus serta suku cadang yang lebih banyak.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	Penyusunan target sampling dan pengujian pada awal tahun belum memperhitungkan kemampuan sampling dan pengujian Balai/Balai Besar dalam Region Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kasus Covid-19 sehingga diterapkan system kerja WFH 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian sampel carry over bln feb Kendala regionalisasi → sampel regionalisasi yang salah kirim / tidak sesuai dengan renlak, kompetensi penguji terkait parameter spesifik regionalisasi laboratorium belum siap
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan balai dalam region Denpasar untuk menentukan target sampling sesuai dgn kemampuan uji dan sampling masing balai Region Denpasar 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga proses Selama WFH melakukan pekerjaan yang tidak membutuhkan kehadiran di Laboratorium. 	<ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan target pengujian Carry over bulan Februari dengan mengutamakan sampel-sampel kasus, pihak ketiga, UMKM dan sampel regionalisasi dari Balai lain Berkoordinasi dengan Balai/Balai Besar dan Loka dalam 1 region terkait pengiriman sampel dan perencanaan pemenuhan kompetensi unruk regionalisasi laboratorium
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Membuat Renlak Sampling sesuai dgn kemampuan uji dan sampling masing balai Region Denpasar 	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan monitoring pegawai yang terpapar Covid 19 Pada saat WFH penguji melakukan kegiatan/ pekerjaan membuat laporan, membuat perencanaan kompetensi, peralatan untuk pemenuhan ruang lingkup 	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan pengaturan jadwal WFO dan WFH bagi penguji secara fleksibel dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Berkoordinasi terkait pengiriman sampel melalui WAG regionalisasi dan melakukan mengusulkan bimtek dengan kepada P3OMN untuk pemenuhan kompetensi unruk regionalisasi laboratorium
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Renlak sampling dan pengujian yang disusun belum mencakup kemampuan uji dan 	Pada saat WFH Penguji fokus pada pemulihan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat sampel carry over di bulan Februari Terdapat beberapa sampel regionalisasi yang

Keterangan	Januari	Februari	Maret
	sampling Balai/Balai Besar dan Loka dalam Region Denpasar hanya menyesuaikan kemampuan uji dan sampling BBPOM Surabaya, Loka Kediri dan Loka Jember		salah kirim dan tidak sesuai renlak, serta perencanaan pelatihan belum mencakup kompetensi yang dibutuhkan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Februari <ul style="list-style-type: none"> • Renlak telah disusun sesuai dengan kemampuan sampling dan uji Balai/Balai Besar dan Loka dalam Region Denpasar 	Kondisi Maret <ul style="list-style-type: none"> • Status Kesehatan penguji telah terpantau, sehingga dijadwalkan WFO • Penguji dapat tetap berkinerja dan menghasilkan output selama WFH 	Kondisi April <ul style="list-style-type: none"> • -

2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 49. Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	-	3,66	-	-
Bulan Pebruari 2022	8,00	12,75	159,36	Tidak dapat disimpulkan
Bulan Maret 2022	17,00	20,208	118,87	Sangat Baik

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan

pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota). BBPOM di Surabaya termasuk laboratorium regional VII dengan koordinator BBPOM di Denpasar. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga triwulan I tahun 2022 adalah 20,21%. Dari 299 sampel yang disampling, seluruhnya telah diperiksa dan sebanyak 148 sampel telah selesai diuji sesuai dengan standar. Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar **melampaui target** yang ditetapkan yaitu 118,87% dengan kriteria **sangat baik**.

b. **Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022**

Tabel 50. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	20,21	20,21	Sangat Kurang

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 20,21%, **belum mencapai** target tahun 2022 dengan kriteria **sangat kurang**. Target presentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan I ditargetkan sebesar 17%, dengan capaian sebesar 20,21% sudah melebihi target untuk Triwulan I. Diharapkan triwulan-triwulan berikutnya dapat memenuhi target sehingga target kumulatif dalam setahun dapat tercapai.

c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Capaian presentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga triwulan I tahun 2022 sudah melampaui target. Capaian yang tinggi disebabkan oleh rendahnya target, karena perencanaan target yang ditetapkan di awal tahun belum memperhitungkan kemampuan sampling dan uji Balai/Balai Besar dan Loka dalam satu region terkait program regionalisasi laboratorium.

Pada Bulan Januari terdapat penugasan sampling dan pengujian kemasan AMDK dan gallon dari pusat, sampling dilakukan pada akhir Bulan Desember 2021 dan penyelesaian pengujian

menjadi capaian pada awal Januari 2022, maka pada bulan Januari sudah terdapat capaian hasil uji.

Pada bulan Februari terdapat Peningkatan kasus Covid-19 sehingga diterapkan system kerja WFH 100%, hal ini menyebabkan terdapat sampel *carry over* bulan Februari yang harus diselesaikan pada bulan Maret.

Regionalisasi laboratorium merupakan pengelompokan laboratorium berdasarkan spesialisasi pengujian, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan. Dengan regionalisasi laboratorium diharapkan adanya efisiensi biaya dan waktu waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.

Beberapa hal yang harus dipenuhi oleh laboratorium terkait regionalisasi, diantaranya alat, suku cadang, reagen dan kompetensi penguji, terutama bagi Balai spesifik seperti BBPOM di Surabaya.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	Penyusunan target sampling dan pengujian pada awal tahun belum memperhitungkan kemampuan sampling dan pengujian Balai/Balai Besar dalam Region Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kasus Covid-19 sehingga diterapkan sistem kerja WFH 100% 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan sampel <i>carry over</i> bulan Februari • Kendala regionalisasi → belum siap peralatan dan kompetensi untuk uji spesifik yaitu Alat <i>Piercing Apparatus</i> (Alat untuk menguji kadar CO₂ dalam air)
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan balai dalam region Denpasar untuk menentukan target sampling sesuai dgn kemampuan uji dan sampling masing balai Region Denpasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Selalu menerapkan protocol Kesehatan • Selama WFH melakukan pekerjaan yang tidak membutuhkan kehadiran di Laboratorium 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan Target pengujian <i>Carry over</i> bulan Februari • Dilakukan pengadaan <i>Piercing Apparatus</i> dan direncanakan Pemenuhan kompetensi
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat Renlak Sampling sesuai dgn kemampuan uji dan sampling masing balai Region Denpasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan monitoring pegawai yang terpapar Covid 19 • Pada saat WFH penguji melakukan kegiatan/ pekerjaan membuat laporan, membuat perencanaan kompetensi, peralatan untuk pemenuhan ruang lingkup 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pengaturan jadwal WFO dan WFH fleksibel dengan tetap menerapkan protokol kesehatan • Dilakukan pengadaan <i>piercing Apparatus</i> dalam • Berkoordinasi dan melakukan usulan terkait materi Bimtek ke P3OMN

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Renlak sampling dan pengujian yang disusun belum sesuai kemampuan uji dan sampling Balai/Balai Besar dan Loka dalam Region Denpasar, hanya menyesuaikan kemampuan uji dan sampling BBPOM Surabaya, Loka Kediri dan Loka Jember 	Pada saat WFH Penguji fokus pada pemulihan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat sampel <i>carry over</i> di bulan Februari Belum memiliki Alat <i>Piercing Apparatus</i> dan perencanaan pelatihan belum mencakup kompetensi yang dibutuhkan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Februari <ul style="list-style-type: none"> Target Kemampuan Uji dan sampling sudah tersusun sesuai kemampuan uji dan sampling Balai/Balai Besar dan Loka dalam Region Denpasar 	Kondisi Maret <ul style="list-style-type: none"> Status Kesehatan penguji telah terpantau, sehingga dijadwalkan WFO Penguji dapat menjaga kinerja selama WFH 	Kondisi April <ul style="list-style-type: none"> -

Sasaran Strategis 7
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 51. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	-	9,67	-	-
Bulan Pebruari 2022	10	9,67	96,67	Baik
Bulan Maret 2022	15	17,857	119,05	Sangat Baik

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))

c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)

d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya hingga triwulan I tahun 2022 adalah 17,86. Capaian nilai persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya hingga triwulan I tahun 2022 **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 119,05% dan mendapat kriteria "**sangat baik**".

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68	17,857	26,26	Sangat Kurang

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2022 belum mencapai target tahun 2022 dengan kriteria "sangat kurang". Perlu dilakukan perbaikan berkesinambungan agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2022 sudah mencapai target.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah :

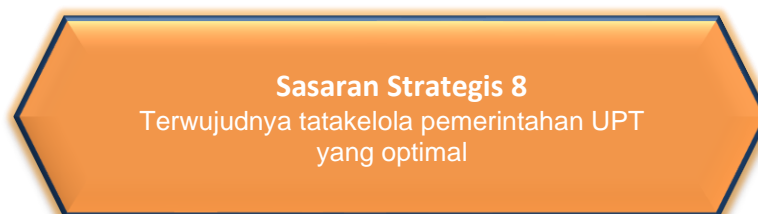
- Sampai dengan triwulan I tahun 2022 telah tercapai 3 perkara dengan rincian realisasi perkara SPDP sebanyak 3 perkara dan sedang dalam proses pemberkasan (telah dilakukan pemanggilan saksi-saksi dan tersangka). Sedangkan realisasi perkara carry over sebanyak 3 perkara dengan rincian tahap P21 sebanyak 1 perkara dan tahap 2 sebanyak 2 perkara.
- Terdapat 8 perkara carry over yang sudah P21 dengan rincian tahun 2016 sebanyak 3 perkara, tahun 2019 sebanyak 3 perkara, tahun 2020 sebanyak 1 perkara dan tahun 2021 sebanyak 1 perkara. Perkara carry over tersebut sedang dalam proses upaya tindak lanjut.

d. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan Pendalaman Informasi, Operasi Penindakan, penyelesaian perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut serta koordinasi dengan instansi terkait (CJS) belum dapat dilakukan secara optimal. • Adanya tersangka yang tidak kooperatif sehingga berpengaruh terhadap proses pemberkasan (pemanggilan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan namun tidak hadir). • Belum diperoleh bukti mengedarkan untuk pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan. • Adanya permintaan untuk perbaikan kelengkapan berkas (PI9) dari Jaksa Penuntut Umum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan Pendalaman Informasi, Operasi Penindakan, penyelesaian perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut serta koordinasi dengan instansi terkait (CJS) belum dapat dilakukan secara optimal. • Adanya tersangka yang tidak kooperatif sehingga berpengaruh terhadap proses pemberkasan (pemanggilan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan namun tidak hadir). • Belum diperoleh bukti mengedarkan untuk pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya tersangka yang tidak kooperatif sehingga berpengaruh terhadap proses pemberkasan (pemanggilan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan namun tidak hadir). • Belum diperoleh bukti mengedarkan untuk pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan. • Penyelesaian perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite. • Melakukan kegiatan penindakan, pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite. • Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite. • Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi serta tersangka dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing.

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum. • Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka. • Pengiriman permohonan surat penetapan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri. • Melaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum. • Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. • Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri.
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite. • Melakukan kegiatan penindakan, pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing, serta pemanggilan tersangka. • Melakukan gelar kasus. • Melaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum. • Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite. • Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing. • Melakukan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka. • Pengiriman permohonan surat penetapan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri. • Melaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum. • Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite. • Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi serta tersangka dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing. • Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. • Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilakukan kegiatan penindakan. • Belum dilakukan perbaikan kelengkapan berkas (P19) dari Jaksa Penuntut Umum. • Belum diperoleh bukti mendedarkan untuk pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan untuk perkara Obat-Obat Tertentu yang ditemukan di ekspedisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum diperoleh bukti mendedarkan untuk pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan untuk perkara OT TIE. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum diperoleh bukti mendedarkan untuk pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan untuk perkara OT TIE.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<p>Kondisi Februari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan kegiatan penindakan dan gelar kasus dengan tindak lanjut pro Justitia. • Telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi. 	<p>Kondisi Maret :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. • Telah dilakukan pemeriksaan tersangka untuk perkara 	<p>Kondisi April :</p> <p>-</p>

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
	<ul style="list-style-type: none"> Telah dikirimkan tindak lanjut terhadap surat P19 dari Jaksa Penuntut Umum. Telah dilakukan penetapan tersangka untuk perkara Obat-Obat Tertentu yang ditemukan di ekspedisi. Telah diterima surat penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri. 	<p>Obat-Obat Tertentu yang ditemukan di ekspedisi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah diterima surat P21 (berkas perkara telah dinyatakan lengkap) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. 	



Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

1. Indeks RB BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 53. Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	-	-	-	-
Bulan Pebruari 2022	-	-	-	-
Bulan Maret 2022	-	-	-	-

Indeks RB BBPOM di Surabaya diperoleh dari hasil penilaian TPI atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI). Hasil penilaian TPI akan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI dan disampaikan kepada UPT

Berdasarkan PermenPANRB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah

berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM : Manajemen Perubahan (bobot 8%), Penataan Tatalaksana (bobot 7%), Penataan Sistem Manajemen SDM (bobot 10%), Penguatan Akuntabilitas Kinerja (bobot 10%), Penguatan Pengawasan (bobot 15%), Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%). Sedangkan rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM adalah Nilai Survey Persepsi Korupsi (bobot15%), Persentase temuan hasil pemeriksaan (5%), Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey ekseternal) (15%).

Hingga triwulan I tahun 2022, belum diperoleh nilai indeks RB dari TPI (Tim Penilai Internal) atau APIP.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 54. Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks RB BBPOM di Surabaya	87,20	-	-	-

Belum ada realisasi indeks RB BBPOM di Surabaya hingga triwulan I tahun 2022.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2021, BBPOM Surabaya telah berhasil memperoleh predikat WBBM. Namun demikian, tetap harus dilakukan perbaikan berkelanjutan sebagai upaya untuk mempertahankan predikat WBBM dan upaya mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Hingga triwulan I tahun 2022 belum dilakukan penilaian LKE ZI oleh TPI. BBPOM Surabaya senantiasa melakukan upaya

pengembangan dari 29 inovasi yang telah diciptakan. Terdapat penambahan inovasi Farmasi class dan Jatim Glowing, namun ada juga penghapusan inovasi SPIKU (spesifik IKU) karena sudah tidak relevan dengan ditambahkannya IKU terkait UMKM untuk UPT di seluruh Indonesia. Terdapat beberapa pengembangan dari inovasi sebelumnya antara lain pengembangan GEMPUR JATIM (berkolaborasi semakin luas dengan beberapa kepala daerah dan perekrutan fasilitator dari daerah), pengembangan RAPORKU (merubah mekanisme penilaian dari 2 aspek menjadi 3 aspek), pengembangan aplikasi Teman Odin (menambah fitur persediaan dan aset), penyelesaian aplikasi SILASKAR (layanan saksi ahli). Penyesuaian dengan Permenpan no.90 tahun 2021 juga dilakukan dengan menambahkan kegiatan prioritas pada aspek reform di semua area perubahan. Hasil survei indeks persepsi RB BBPOM di Surabaya tahun 2022 adalah 3,916 sedangkan hasil survey indeks budaya organisasi adalah 3,891.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> Kesulitan menyusun renja prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah inovasi yang harus dikawal semakin banyak, namun jumlah AOC terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> Inovasi SPIKU tidak bisa dimanfaatkan lagi karena sudah ada IKU terkait UMKM untuk seluruh UPT
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan aspek reform sebagai prioritas rencana aksi 	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan jumlah AOC 	<ul style="list-style-type: none"> Inovasi SPIKU boleh dihentikan, karena sudah ada penambahan inovasi lain
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan aspek reform sebagai prioritas rencana aksi 	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan jumlah AOC sesuai usulan dari masing-masing substansi 	<ul style="list-style-type: none"> Pencabutan SK inovasi SPIKU
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada renja prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah AOC terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> Inovasi SPIKU belum dihentikan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Pebruari <ul style="list-style-type: none"> Renja prioritas selesai disusun sesuai rekomendasi 	Kondisi Maret <ul style="list-style-type: none"> Jumlah AOC bertambah menjadi 24 orang 	Kondisi April <ul style="list-style-type: none"> -

2. Nilai AKIP BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 55. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	-	-	-	-
Bulan Pebruari 2022	-	-	-	-
Bulan Maret 2022	-	-	-	-

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Surabaya adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan rentang nilai sebagai berikut :

Tabel 56. Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90-100	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d. 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d. 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja (30%), (2) Pengukuran Kinerja (30%), (3) Pelaporan Kinerja (15%), (4) Evaluasi AKIP (25%). Hingga triwulan I tahun 2022 belum ada realisasi Nilai AKIP dari APIP.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 57. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	84,10	-	-	-

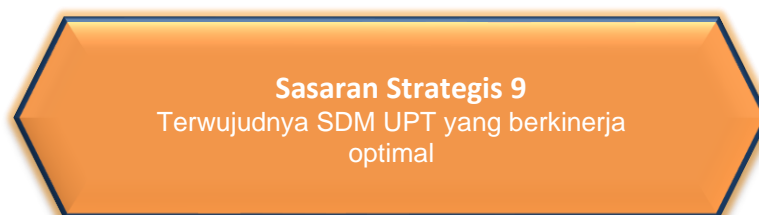
Belum ada realisasi nilai AKIP BBPOM di Surabaya hingga triwulan I tahun 2022 sehingga belum bisa dibandingkan dengan target tahun 2022.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2021, BBPOM di Surabaya telah berhasil menaikkan nilai AKIP menjadi 82,79 (A), namun demikian perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan nilai tersebut atau bahkan meningkatkan nilai tersebut di tahun 2022. Pada triwulan I tahun 2022, telah dilakukan upaya penyusunan SKP berdasarkan permenpan 8 tahun 2020 melalui aplikasi simakin yang sudah menunjukkan cascading kinerja dari eselon 2 dalam hal ini Kepala Balai ke ketua tim hingga ke anggota tim kerja. Pada SKP tersebut sudah terdapat indikator individu yang selaras dengan indikator kinerja ketua tim. Hal ini sudah sesuai dengan rekomendasi APIP di tahun 2021 untuk menyempurnakan pemetaan cascading indikator kinerja sampai level individu.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> Kesulitan dalam mengevaluasi kinerja pengujian terkait regionalisasi laboratorium 	<ul style="list-style-type: none"> Terjadi perubahan data beberapa kali tanpa konfirmasi 	<ul style="list-style-type: none"> Kesulitan dalam pemetaan cascading indikator kinerja terkait beberapa SK yang belum terakomodir kedalam Rencana Kinerja
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan laboratorium regional untuk menyusun form monev yang tepat 	<ul style="list-style-type: none"> Diadakan mekanisme jelas untuk perubahan data 	<ul style="list-style-type: none"> Adakan pertemuan untuk membuat kesepakatan bersama dengan semua substansi, agar semua SK penunjukan tim dapat terakomodir kedalam SKP
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan laboratorium regional untuk menyusun form monev yang tepat 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat form perubahan data pada RAPK Balai 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pertemuan dialog kinerja bersama kepala balai, koordinator dan sub koordinator
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada form monev untuk hasil pengujian laboratorium regional 	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada form perubahan data 	<ul style="list-style-type: none"> SK penunjukan tim belum dapat terakomodir kedalam SKP
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Pebruari <ul style="list-style-type: none"> Sudah ada form monev untuk hasil pengujian regional 	Kondisi Maret <ul style="list-style-type: none"> Sudah ada form perubahan data dan sudah dimanfaatkan 	Kondisi April -



Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

1. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya

Tabel 58. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	-	-	-	-
Bulan Pebruari 2022	-	-	-	-
Bulan Maret 2022	-	-	-	-

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya diperoleh dari hasil survei menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25 % ; kompetensi memiliki bobot 40 % ; kinerja memiliki bobot 30 % ; dan disiplin memiliki bobot 5 %. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;*
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;*
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;*
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan*
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.*

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Hingga triwulan I tahun 2022 belum diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya.

b. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 59. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,25	-	-	-

Belum diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN hingga triwulan I tahun 2022 sehingga belum bisa dibandingkan dengan target tahun 2022.

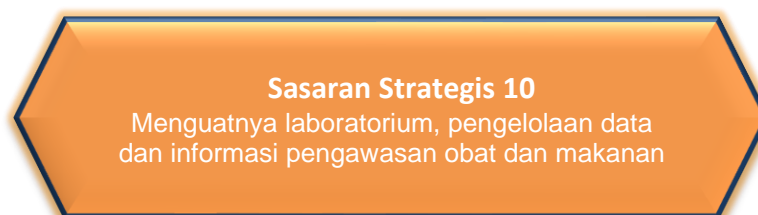
c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Hingga triwulan I tahun 2022 telah dilakukan rencana aksi untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain : pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti upacara, penerapan inovasi PINSIL (pemberian pin kepada 3 orang pegawai dengan jumlah keterlambatan paling banyak) dan penyusunan SKP di triwulan I. Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/seminar yang diselenggarakan oleh PPSDM, sehingga diharapkan pada akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi. Hingga triwulan I tahun 2022, sudah 81% pegawai atau 114 dari 141 pegawai yang sudah mengikuti pengembangan kompetensi dan sebanyak 28% sudah memenuhi target 20 JP. Untuk menegakkan disiplin pegawai pada masa pandemi Covid-19, dilakukan apel *online* via zoom setiap senin dan kamis (inovasi apel manis) untuk memastikan semua pegawai tetap berkinerja meskipun bekerja dari rumah dan mensosialisasikan semua informasi penting lainnya kepada seluruh pegawai. Untuk memacu kinerja pegawai, diterapkan juga mekanisme *reward* dan *punishment* pegawai, dimana pegawai yang mempunyai kinerja terbaik dan disiplin tinggi diberi penghargaan pegawai teladan dengan diberi kompensasi peningkatan kompetensi sesuai pilihan pribadi dengan biaya dari kantor. Sedangkan untuk pegawai yang berkinerja terendah diberikan sertifikat pegawai berkinerja terendah untuk memacu pegawai tersebut meningkatkan kinerjanya.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
Kendala/Permasalahan	• -	• Masih banyak pegawai yang belum mendapatkan pelatihan	• SKP tahun 2022 belum selesai disusun
Rekomendasi Perbaikan	• -	• Bagian kepegawaian agar selalu mengingatkan di WAG Balai bila ada	• Segera menindaklanjuti pegawai yang bellum menyusun

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
		jadwal peningkatan kompetensi dari pusat	
Rencana Aksi	• -	<ul style="list-style-type: none"> Bagian kepegawaian selalu mengingatkan di WAG Balai bila ada jadwal peningkatan kompetensi dari PPSDM agar dapat segera diikuti semua pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pendampingan kepada pegawai yang belum selesai menyusun SKP
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	• -	<ul style="list-style-type: none"> Baru 59% pegawai yang mendapatkan pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat 2 orang yang belum menyusun SKP
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Pebruari • -	Kondisi Maret <ul style="list-style-type: none"> Sudah 81 % pegawai yang mendapatkan pelatihan 	Kondisi April -



Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 60. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	-	-	-	-
Bulan Pebruari 2022	-	-	-	-
Bulan Maret 2022	-	-	-	-

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesment Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan

Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Standar Ruang Lingkup > 65,
2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
3. Standar Alat Laboratorium > 70.

Terkait dengan implementasi Regionalisasi Laboratorium tahun 2022 dan pemenuhan kapasitas dan kemampuan Laboratorium, pada akhir Maret 2022 telah dilakukan Monitoring Pemenuhan SKL Triwulan I oleh PPPOMN, namun belum terdapat hasil penilaian terhadap capaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) BBPOM di Surabaya.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 61. Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2021	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83	-	-	-

Belum ada realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP hingga triwulan I tahun 2022 sehingga belum dapat dibandingkan dengan target tahun 2022.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2022 terdapat perubahan tools penilaian SKL, hal ini disebabkan adanya Regionalisasi Laboratorium, sehingga standar yang digunakan untuk penilaian disesuaikan pula dengan penugasan yang diberikan terhadap laboratorium tersebut. BBPOM di Surabaya senantiasa berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Usaha yang dilakukan pada triwulan I untuk mencapai target antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi personel laboratorium, dan Standar Alat Laboratorium.
- Melakukan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dengan membuat perencanaan verifikasi metode dan perencanaan uji sampel untuk pemenuhan ruang lingkup
- Melakukan pemenuhan Standar Kompetensi Personel dengan merencanakan pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan secara daring yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, maupun dari P3OMN.

- Pemenuhan Standar Alat laboratorium dilakukan dengan memprioritaskan pengadaan alat untuk pemenuhan GLP dan pemenuhan kebutuhan regionalisasi laboratorium.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	Petunjuk teknis regionalisasi laboratorium baru diterbitkan sehingga laboratorium baru mendapatkan kepastian parameter apa saja yang menjadi tugasnya dan baru dapat merencanakan pemenuhan SRL, kompetensi dan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan	Beberapa alat, suku cadang, reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk regionalisasi laboratorium dan pemenuhan SRL belum tersedia, dan terlalu lama bila menunggu proses lelang.	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi mutasi terhadap staf penguji dan penambahan staf (CPNS dan pindahan dari UPT lain) mempengaruhi penilaian terhadap standar kompetensi laboratorium • Beberapa alat laboratorium mengalami kerusakan sehingga harus dilakukan pengadaan untuk menggantikan alat yang rusak
Rekomendasi Perbaikan	Dibuat perencanaan pemenuhan SRL, kompetensi dan peralatan	Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan alat, suku cadang, reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk regionalisasi laboratorium dan pemenuhan SRL	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pemenuhan kompetensi terhadap staf CPNS dan Pindahan • Dilakukan pengadaan untuk menggantikan alat yang rusak
Rencana Aksi	Membuat perencanaan pemenuhan SRL, kompetensi dan alat sesuai dengan kebutuhan regionalisasi	Dilakukan revisi anggaran untuk alokasi alat, suku cadang, reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk regionalisasi laboratorium dan pemenuhan SRL	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pemetaan kompetensi terhadap staf pindahan, dan perencanaan pemenuhan kompetensi terhadap CPNS • Pengadaan alat yang rusak direncanakan dengan mengoptimisasi anggaran sisa pengadaan alat
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Perencanaan pemenuhan SRL, kompetensi dan alat berdasarkan standar kemampuan laboratorium tahun 2021	Alat, suku cadang, reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk regionalisasi laboratorium tidak dapat dipenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • kompetensi terhadap staf pindahan belum terpetakan dan belum ada perencanaan pemenuhan kompetensi terhadap CPNS • Alat yang rusak tidak dapat digunakan dan mengganggu proses pengujian
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Februari Perencanaan pemenuhan SRL, kompetensi dan alat telah disusun dengan mengakomodir Regionalisasi laboratorium	Kondisi Maret Alat, suku cadang, reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk regionalisasi laboratorium dapat dipenuhi	Kondisi April <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi staf pindahan telah terpetakan dan perencanaan pemenuhan kompetensi terhadap CPNS dan staf pindahan telah dibuat • Beberapa alat laboratorium yang rusak dalam proses pengadaan (tahap pemesanan)

2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 62. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan Januari 2022	-	-	-	-
Bulan Pebruari 2022	-	-	-	-
Bulan Maret 2022	2,5	2,2	88	Cukup

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracunan.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: *email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai*. Pemanfaatan *email* yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Hingga triwulan I tahun 2022 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Badan POM sebesar 2,2. Capaian nilai Indeks pengelolaan data dan informasi sebesar 88% atau belum mencapai **target** yang telah ditetapkan dengan kriteria **cukup**.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 63. Perbandingan Realisasi pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,5	2,2	88	Cukup

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal hingga triwulan I tahun 2022 **belum mencapai** target tahun 2022 dengan kriteria cukup. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator hingga triwulan I tahun 2022 dari Pusat Data dan Informasi dapat dilihat sebagai berikut:

Pemutakhiran SIPT	Pemutakhiran SPIMKER	Pemanfaatan <i>Email</i>	Pemanfaatan <i>Sharing folder</i>	Pemanfaatan <i>Dashboard BCC</i>	Pemanfaatan Berita Aktual	Realisasi Indeks
1	3	3	3	3	3	2,2

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi triwulan I belum mencapai target yang ditetapkan, karena masih rendahnya nilai pemutakhiran SIPT, sedangkan nilai komponen lainnya sudah mendapat nilai maksimal yaitu 3. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain:

- Melakukan *monev input* SIPT setiap bulan.
- Memutakhirkan SPIMKER tepat waktu
- meningkatkan akses *email* pegawai dengan mentautkan Absensi *Online* "SIKEMAH" dengan halaman *login email pom.go.id*, serta mengirim *email* pemberitahuan terkait kepegawaian kepada seluruh pegawai melalui *email pom.go.id* dengan permintaan untuk *reply*.
- Tetap rutin melakukan upload berita aktual dengan target 30 berita dalam 1 triwulan

Nilai indeks pemutakhiran SIPT pada Triwulan I masih rendah karena masih terdapat beberapa kendala pada SIPT dimana entry Hasil Uji sampai saat ini belum dapat digunakan.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> Masih ada beberapa pegawai yang belum aktif menggunakan email corporate entry penandaan belum selesai dilakukan sehingga menghambat entry pada tahun 2022 (sampai pertengahan Januari, masih terdapat sampel dari Balai lain yang belum melakukan entry penandaan), Entry Sarana telah dapat dilakukan sejak awal januari kecuali pangan karena ada perubahan form 	<ul style="list-style-type: none"> SIPT Sampling per Februari baru dapat digunakan dari operator - supervisor - TPS, TPS belum dapat mengirim ke MT Modul Pengujian, Per 24 Februari, TPS telah dapat mengirimkan SIPT ke MT (Namun MT belum dapat meneruskan ke Penyelia) 	<ul style="list-style-type: none"> Form Input SPK dan SPP untuk semua komoditi di role MT Pengujian & Penyelia Pengujian (Kecuali Komoditi Kosmetik) telah dapat digunakan, Entry Hasil Uji sampai saat ini belum dapat digunakan
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Mengumumkan nama-nama pegawai yang belum aktif menggunakan email corporate Berkoordinasi dengan Pusdatin 	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Pusdatin 	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Pusdatin
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Mengumumkan nama-nama pegawai yang belum aktif menggunakan email corporate sebelum akhir bulan 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi SIPT tahap I (Entri Sampling sampai ke TPS) 	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Pusdatin
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Masih ada beberapa pegawai yang belum aktif menggunakan email corporate 	<ul style="list-style-type: none"> SIPT belum dapat digunakan maksimal, masih banyak kendala 	<ul style="list-style-type: none"> SIPT belum dapat digunakan maksimal, masih banyak kendala
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Pebruari <ul style="list-style-type: none"> Jumlah pegawai yang belum aktif menggunakan email corporate berkurang 	Kondisi Maret <ul style="list-style-type: none"> SIPT masih belum dapat digunakan maksimal, masih banyak kendala 	Kondisi April <ul style="list-style-type: none"> -

Sasaran Strategis 11
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11

1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2022

Tabel 64. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya hingga triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2022	REALISASI BULANAN 2022	% CAPAIAN BULANAN 2022	KRITERIA
Januari	-	-	-	-
Pebruari	5	48,68	973,68	Tidak dapat disimpulkan
Maret	15	66,792	445,28	Tidak dapat disimpulkan

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus :

$$(Nilai EKA \times 60\%) + (Nilai IKPA \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Terdapat perubahan cara perhitungan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang awalnya memuat 13 (tiga belas) indikator berubah menjadi 8 (delapan) indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Delapan (8) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, serta Dispensasi SPM. Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi OM SPAN. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai EKA diperoleh dari aplikasi SMART.

Realisasi nilai kinerja anggaran BBPOM di Surabaya hingga triwulan I tahun 2022 adalah 66,792, diperoleh dari nilai IKPA 47,94 dan nilai EKA 95,07. Capaian nilai kinerja anggaran BBPOM di Surabaya hingga triwulan I tahun 2022 **jauh melampaui target** yang ditetapkan yaitu 445,28% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan** .

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

Tabel 65. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran hingga triwulan I tahun 2022 dengan target tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TRIWULAN I	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	94	66,792	71,06	Cukup

Realisasi nilai kinerja anggaran hingga triwulan I tahun 2022 **belum mencapai** target tahun 2022 dengan kriteria cukup. Perlu dilakukan perbaikan berkesinambungan agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian nilai kinerja anggaran hingga triwulan I tahun 2022 yang sudah jauh melampaui target. Capaian yang terlalu tinggi disebabkan oleh rendahnya target, karena perencanaan target ditetapkan dengan asumsi memakai metode perhitungan IKPA yang lama. Pada bulan Maret baru disosialisasikan mengenai perubahan indikator penilaian IKPA oleh Kementerian keuangan, yang semula 13 indikator menjadi 8 indikator saja. Capaian nilai kinerja anggaran juga dipengaruhi oleh masih rendahnya nilai penyerapan anggaran dan capaian output pada komponen IKPA yang disebabkan adanya beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai POA, dan capaian output yang lebih kecil dari penyerapan anggaran sehingga nilainya tidak sempurna.

KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
	REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
Nilai	100.00	100.00	87.12	100.00	100.00	99.75	100.00	86.30	66.55	70%	95.07
Bobot	0	10	0	10	10	10	5	25			
Nilai Akhir	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	9.97	5.00	21.58			
Nilai Aspek	100.00		99.94					86.30			

Nilai EKA hingga triwulan I tahun 2022 adalah 47,94 dengan komponen nilai penyerapan 15,87; konsistensi 92,58; capaian RO 2,18; efisiensi 20; dan nilai efisiensi 100. Tingginya nilai efisiensi dikarenakan capaian output lebih tinggi daripada penyerapan anggaran, namun capaian output masih rendah dibandingkan target 1 tahun.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
Kendala/Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi OM SPAN dan SMART masih belum aktif sehingga belum tampak nilai IKPA dan EKA Pengadaan jasa kebersihan dan keamanan kantor belum selesai 	<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi OM SPAN dan SMART masih belum aktif sehingga belum tampak nilai IKPA dan EKA Realisasi anggaran belum sesuai POA karena kegiatan KIE belum dapat dilaksanakan menunggu kesediaan tokoh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi anggaran belum mencapai target penyerapan triwulan I

Keterangan	Januari	Pebruari	Maret
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Menunggu aplikasi aktif • Monev penyerapan anggaran dan percepatan kontrak pengadaan barang dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Menunggu aplikasi aktif • Berkoordinasi aktif dengan tokoh masyarakat agar dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan proses kontrak pengadaan barang dan jasa
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Monev penyerapan anggaran dan percepatan kontrak pengadaan jasa kebersihan dan keamanan kantor, pengadaan alat laboratorium, dan pengadaan APD yang memungkinkan untuk direalisasikan di triwulan I 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi aktif dengan tokoh masyarakat agar dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan proses pencairan kontrak pengadaan barang dan jasa
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • aplikasi belum aktif • belum ada penandatanganan kontrak selain sewa rumah dinas dan sewa gudang barang bukti • realisasi anggaran Januari 1,83% 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada pelaksanaan kegiatan KIE 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrak yang sudah dilakukan pembayaran 7 kontrak
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Pebruari <ul style="list-style-type: none"> • aplikasi belum aktif • Penandatanganan kontrak alat lab dan baku kimia • realisasi anggaran Pebruari 6,71% Kondisi Maret <ul style="list-style-type: none"> • realisasi anggaran Maret 14,08% 	Kondisi Maret <ul style="list-style-type: none"> • KIE baru dapat dilaksanakan mulai bulan Maret 	Kondisi April -

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Surabaya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021 No. SP DIPA-063.01.2.432784/2021 yang diterbitkan pada tanggal 17 Nopember 2021 sebesar Rp56.083.984.000,- (lima puluh enam milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan blokir dalam rangka penanganan pandemi covid 19 sebesar Rp.892.256.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah). Realisasi anggaran hingga triwulan I tahun 2022 adalah Rp 7.895.838.114,- atau 14,08%.

Pengelolaan anggaran BBPOM di Surabaya senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Surabaya dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Percepatan pengadaan barang dan jasa

3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* (dalam laporan ini, capaian *input* yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Surabaya tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 66. Tingkat Efisiensi Kegiatan

NO.	KEGIATAN	TE	KATEGORI
1.	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	-0,50	TIDAK EFISIEN
2.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	2,98	EFISIEN
3.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	0	EFISIEN
4.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	5,0	EFISIEN
5.	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	1,95	EFISIEN
6.	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0	EFISIEN
7.	Perangkat pengolah data dan komunikasi	0	EFISIEN
8.	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0	EFISIEN
9.	Layanan Umum	0,74	EFISIEN
10.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1,45	EFISIEN
11.	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BBPOM Surabaya	0,54	EFISIEN
12.	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5,53	EFISIEN
13.	Desa Pangan Aman	2,21	EFISIEN
14.	Pasar aman dari bahan berbahaya	0,21	EFISIEN
15.	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	0,23	EFISIEN
16.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	2,52	EFISIEN
17.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	-0,16	TIDAK EFISIEN
18.	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	1,55	EFISIEN
19.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	0,67	EFISIEN
20.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	0,83	EFISIEN
21.	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0,00	EFISIEN
22.	Layanan Perkantoran	1,09	EFISIEN

Pada tahun 2022 BBPOM di Surabaya melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil 2 kegiatan tidak efisien dan 20 kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,5 hingga 5,53 (Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BBPOM di Surabaya mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

4.1 Kesimpulan

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari periode Rencana Strategis 2021-2024. Sesuai Reviu Renstra 2020-2024, BBPOM di Surabaya mempunyai 11 sasaran strategis dengan 29 indikator. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator, telah dilakukan 22 kegiatan utama.

1. Dari 11 sasaran strategis, hanya 6 sasaran strategis yang bisa dievaluasi, sedangkan 5 sasaran strategis lainnya baru bisa dievaluasi akhir tahun atau menunggu nilai dari Badan POM. Dari 6 sasaran strategis yang dievaluasi diperoleh 1 sasaran strategis memperoleh capaian "SANGAT BAIK", 2 sasaran strategis memperoleh capaian "BAIK", 1 sasaran strategis memperoleh capaian "KURANG", dan 2 sasaran strategis memperoleh capaian "TIDAK DAPAT DISIMPULKAN".
2. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:
 - Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 102,44% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2022
 - Belum ada capaian indikator sasaran strategis kedua pada triwulan I tahun 2022, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2022 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya
 - Belum ada capaian indikator sasaran strategis ketiga pada triwulan I tahun 2022, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2022 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya
 - Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 97,66% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya.
 - Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 68,65% dengan kriteria **KURANG**, hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih tinggi agar BBPOM di Surabaya dapat mencapai target triwulan selanjutnya dalam meningkatkan efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya

- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 134,64% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan I dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya
 - Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 119,05% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2022
 - Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan, hasil akan diperoleh pada triwulan I tahun 2022 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal
 - Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesembilan, hasil akan diperoleh pada triwulan I tahun 2022 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal
 - Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesepuluh, hasil akan diperoleh pada triwulan I tahun 2022 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
 - Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesebelas sebesar 445,28% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan I dalam mengelola keuangan BBPOM di Surabaya secara akuntabel pada triwulan 1 tahun 2022.
3. Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Surabaya pada tahun 2022 antara 35,71% sampai dengan 445,28%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya” disebabkan adanya juknis pelaksanaan kegiatan yang tidak segera turun dari pusat, sehingga kegiatan tidak bisa segera dilaksanakan. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Nilai Kinerja Anggaran UPT” sebesar 445,28%, hal ini disebabkan karena target yang terlalu rendah di triwulan I, serta adanya perubahan cara perhitungan IKPA.
 4. Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil 2 kegiatan tidak efisien dan 20 kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,5 hingga 5,53 (Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman).

4.2 Saran

1. Dari 20 indikator kinerja yang bisa dievaluasi, 11 diantaranya belum mencapai target triwulan I sehingga perlu pemantauan lebih ketat agar terjadi perbaikan di triwulan II, dengan menindaklanjuti semua rekomendasi yang dihasilkan saat rapat evaluasi bulanan.
2. Masih ada 3 indikator dengan capaian tidak dapat disimpulkan karena penentuan target bulanan yang terlalu rendah, sehingga dapat dijadikan acuan penentuan target untuk tahun depan supaya lebih sesuai dengan kondisi capaian tiap bulan.

LAMPIRAN

Lampiran I

1. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Surabaya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Surabaya
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Surabaya

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.5
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.6
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	79
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84.7
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77.09

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90.5
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98.5
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.45
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	60
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.92

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	76
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	28
20	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	18
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	87.2
25	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	84.1
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.25
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
29	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
56,083,984,000.00

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Surabaya, 16 Desember 2021

Pihak Pertama

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BBPOM di Surabaya
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	626.084.000,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	299.032.800,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	156.521.000,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	154.047.200,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	73.957.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												79	260.000.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												84.7	180.260.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												77.09	350.000.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												90.5	111.519.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	48.860.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	468.944.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	870.278.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	473.668.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	876.011.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM							4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	111.519.000,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	16	25	33	33	41	50	58	66	75	83	91	60	390.696.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	92.92	8.561.400.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		5	15	20	25	40	50	60	75	90	95	76	785.661.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman		5	15	20	25	35	40	47.5	65	70	85	28	1.195.660.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		5	13	21	29	37	47	57	67	77	87	100	782.605.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		8	17	27	36	43	53	63	73	83	93	100	453.080.000,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		10	15	20	25	30	35	40	50	55	60	68	1.540.316.000,00
23.	Indeks RB UPT											87.2		26.311.506.000,00
24.	Nilai AKIP UPT											84.1		367.340.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											85.25		181.550.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											83		9.346.530.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	462.840.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	15	30	50	55	60	65	70	75	80	94	39.600.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	28	40	60	60	70	70	80	90	90	18	604.499.000,00
Total												56.083.984.000,00	

Surabaya, 16 Desember 2021

Kepala Balai Besar POM di Surabaya



[Handwritten signature]

Dra. Rullyawati, Apt, M.Kes.Epid

Penetapan target indikator di bawah ini;

- a. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
- b. Jumlah desa pangan aman
- c. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
- d. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Target B01 s.d B11 menggambarkan progres kegiatan
2. Target B12 merupakan target indikator.



**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA**

Jl. Karangmenjangan No.20 Surabaya 60286
Telp. (031) 5020575, 5022815 | ULPK. (031) 5048833 | Fax. (031) 5015486
e-mail : bpom_surabaya@pom.go.id ; ulpk_sby@yahoo.co.id | website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
NOMOR PR.04.01.15A.15A5.12.21.1150 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
NOMOR PR.04.01.15A.15A5.04.21.1146 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
TAHUN 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor PR.04.01.15A.15A5.04.21.1146 Tahun 2021 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK.02.02.15A.15A5.12.21.3792 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya tentang Perubahan atas Keputusan Kepala

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya
Nomor PR.04.01.15A.15A5.04.21.1146 Tahun 2021
tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Surabaya Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

11. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK.02.02.15A.15A5.12.21.3792 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA NOMOR PR.04.01.15A.15A5.04.21.1146 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2022.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA



RUSTYAWATI

LAMPIRAN
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI
 BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 DI SURABAYA NOMOR
 PR.04.01.15A.15A5.04.21.1146 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
 SURABAYA TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
 SURABAYA TAHUN 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,6
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	6. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	79
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	84,7

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	pengawasan Obat dan Makanan	
		8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77,09
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya	90,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,5
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62
		15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya	4,45
		16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau	60

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	17. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,92
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76
		19. Jumlah desa pangan aman	28
		20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	18
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Surabaya	87,2
		25. Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	84,1
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,25
10	Menguatnya laboratorium,	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat	83

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	dan Makanan sesuai standar GLP	
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	94

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA



[Handwritten signature]

RUSTYAWATI

2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2022 BALAI BESAR POM DI SURABAYA

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e=(d/cx100)	f	g	h=(g/fx100)
1.	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	3	21,43	417.964.000	180.000.000	43,07
2.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	18310	4.675	25,53	1.398.570.000	89.633.000	6,41
3.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	104	0	37,25	390.696.000		0
4.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	25,00	1.289.740.000	54.064.484	4,19
5.	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	50	9	18,00	260.000.000	15.840.000	6,09
6.	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	5,00	587.511.000	-	0
7.	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	0	79,23	137.000.000	108.542.000	79,23
8.	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	0	5,00	200.000.000	-	0
9.	Layanan Umum	1	1	25,00	753.448.000	108.026.298	14,34
10.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	25,00	3.000.000.000	306.376.537	10,21
11.	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BBPOM Surabaya	11	3	27,27	1.122.352.000	198.548.000	17,69
12.	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	76	0	10,00	785.661.000	12.028.000	1,53
13.	Desa Pangan Aman	28	0	10,00	1.195.660.000	37.206.200	3,11
14.	Pasar aman dari bahan berbahaya	18	0	10,00	604.499.000	49.874.880	8,25
15.	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	24300	3.306	13,60	8.911.400.000	987.341.984	11,08
16.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	972	139	14,30	906.160.000	36.844.850	4,07
17.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	2557	234	9,15	1.565.210.000	169.628.426	10,84
18.	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	134	0	0,00	73.957.000	16.248.000	21,97
19.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	440	102	23,18	487.128.000	67.600.000	13,88
20.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,	774	134	17,31	986.541.000	93.235.132	9,45

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian
	Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM						
21	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	11,16	6.146.530.000	685.961.500	11,16
22	Layanan Perkantoran	1	1	25,00	24.863.957.000	2.967.492.093	11,93

3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TRIWULAN I TAHUN 2022

No	Program/Kegiatan	Output	Input	IE	TE	Capaian TE
		%	%			
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	21,43	43,07	0,50	-0,50	75 %
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	25,53	6,41	3,98	2,98	75 %
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	37,25	0,00	0,00	0,00	-
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	25,00	4,19	5,96	5,0	75 %
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	18,00	6,09	2,95	1,95	75 %
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	5,00	0,00	0,00	0,00	-
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	79,23	79,23	1,00	0,00	100 %
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	5,00	0,00	0,00	0,00	-
9	Layanan Umum	25,00	14,34	1,74	0,74	90 %
10	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	25,00	10,21	2,45	1,45	80 %
11	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BBPOM Surabaya	27,27	17,69	1,54	0,54	92 %
12	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	10,00	1,53	6,53	5,53	75 %
13	Desa Pangan Aman	10,00	3,11	3,21	2,21	75 %
14	Pasar aman dari bahan berbahaya	10,00	8,25	1,21	0,21	95 %
15	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	13,60	11,08	1,23	0,23	95 %
16	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	14,30	4,07	3,52	2,52	75 %
17	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	9,15	10,84	0,84	-0,16	75 %
18	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	55,97	21,97	2,55	1,55	80 %
19	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	23,18	13,88	1,67	0,67	90 %
20	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	17,31	9,45	1,83	0,83	88 %
21	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	11,16	11,16	1,00	0,00	75 %
22	Layanan Perkantoran	25,00	11,93	2,09	1,09	86 %

LAMPIRAN 2 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

1. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN SAMPLING DAN PENGUJIAN

No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Maret											RAPK s.d Maret (Jan-Mar)				
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai	pembilang	Penyebut	capaian	
						TIE/Illegal/Palsu	kedaluwarsa	rusak				MS	TMS*							
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa																				
1	Obat	Random	Surabaya	585	148	0	0	0	31	148	35	28	7	7	113	35				
			Kabupaten Kediri	42							0	0	0	0	0	0				
			Kabupaten Jember	62	10	0	0	0	0	0	10	1	1	0	0	9	1			
		TOTAL	689	158	0	0	0	31	158	36	29	7	7	122	36					
		Targeted	Surabaya	146	29	0	0	0	7	29	15	12	3	3	14	15				
			Kabupaten Kediri	11							0	0	0	0	0	0				
Kabupaten Jember	16		6	0	0	0	0	6	1	1	0	0	5	1						
TOTAL	173	35	0	0	0	7	35	16	13	3	3	19	16							
TOTAL RANDOM DAN TARGETED	862	193	0	0	0	38	193	52	42	10	10	141	52							
2	Obat Tradisional	Random	Surabaya	384	124	0	0	0	9	124	33	29	4	4	91	33				
			Kabupaten Kediri	30							0	0	0	0	0	0				
			Kabupaten Jember	41	11	0	0	0	2	11	5	4	1	1	6	5				
		TOTAL	455	135	0	0	0	11	135	38	33	5	5	97	38					
		Targeted	Surabaya	164	42	0	0	0	9	42	18	15	3	3	24	18				
			Kabupaten Kediri	13							0	0	0	0	0	0				
Kabupaten Jember	18		3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0						
TOTAL	195	45	0	0	0	9	45	18	15	3	3	27	18							
TOTAL RANDOM DAN TARGETED	650	180	0	0	0	20	180	56	48	8	8	124	56							
3	Obat Kuasi	Random	Surabaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Kabupaten Kediri	0							0	0	0	0	0	0				
			Kabupaten Jember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Targeted	Surabaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Kabupaten Kediri	0							0	0	0	0	0	0	0			
Kabupaten Jember	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
TOTAL RANDOM DAN TARGETED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	Suplemen Kesehatan	Random	Surabaya	102	32	0	0	0	0	32	12	12	0	0	20	12				
			Kabupaten Kediri	8							0	0	0	0	0	0				
			Kabupaten Jember	11	3	0	0	0	0	3	1	1	0	0	2	1				
		TOTAL	121	35	0	0	0	3	35	13	13	0	0	22	13					
		Targeted	Surabaya	44	10	0	0	0	1	10	3	2	1	1	7	3				
			Kabupaten Kediri	3							0	0	0	0	0	0				
Kabupaten Jember	5		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0						
TOTAL	52	11	0	0	0	1	11	3	2	1	1	8	3							
TOTAL RANDOM DAN TARGETED	173	46	0	0	0	1	46	16	15	1	1	30	16							
5	Kosmetik	Random	Surabaya	767	227	0	0	0	60	227	92	69	23	23	135	92				
			Kabupaten Kediri	56							0	0	0	0	0	0				
			Kabupaten Jember	82	20	0	0	0	10	20	7	2	5	5	13	7				
		TOTAL	905	247	0	0	0	70	247	99	71	28	28	148	99					
		Targeted	Surabaya	329	94	0	0	0	26	94	26	18	8	8	68	26				
			Kabupaten Kediri	24							0	0	0	0	0	0				
Kabupaten Jember	35		9	0	0	0	4	9	4	2	2	2	5	4						
TOTAL	388	103	0	0	0	30	103	30	20	10	10	73	30							
TOTAL RANDOM DAN TARGETED	1293	350	0	0	0	100	350	129	91	38	38	221	129							
6	Rokok	Targeted	Surabaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Kabupaten Kediri	0							0	0	0	0	0	0				
			Kabupaten Jember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TOTAL	Random	Surabaya	1838	531	0	0	0	100	531	172	138	34	34	359	172	138	172	80,23%		
		Kabupaten Kediri	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
		Kabupaten Jember	196	44	0	0	0	12	44	14	8	6	6	30	14	8	14	57,14%		
	TOTAL	2170	575	0	0	0	112	575	186	146	40	40	389	188	146	186	78,49%			
	Targeted	Surabaya	683	175	0	0	0	43	175	62	47	15	15	113	62	47	62	75,81%		
		Kabupaten Kediri	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
Kabupaten Jember		74	19	0	0	0	4	19	5	3	2	2	14	5	3	5	60,00%			
TOTAL	808	194	0	0	0	47	194	67	50	17	17	127	67	50	67	74,63%				
TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKOK				2521	706	0	0	0	143	706	234	185	49	49	472	234				
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar				270	63	0	0	0	16	63	19	11	8	8	44	19				
TOTAL				2978	769	0	0	0	159	769	253	196	57	57	516	253				
1	Pangan (selain Fortifikasi)	Random	Surabaya	770	202	0	0	0	30	202	120	105	15	15	82	120	105	120	87,50%	
			Kabupaten Kediri	60							0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			Kabupaten Jember	89	23	0	0	0	1	23	12	11	1	1	11	12	11	12	91,67%	
		TOTAL	919	225	0	0	0	31	225	132	116	16	16	93	132					
		Targeted	Surabaya	206	22						0	22	19	0	0	3	19	19	19	100,00%
			Kabupaten Kediri	20							0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Kabupaten Jember	28		5						1	5	2	2	0	3	2	2	2	100,00%		
TOTAL	254	27	0	0	0	1	27	21	21	0	0	6	21							
TOTAL RANDOM DAN TARGETED	1173	252	0	0	0	32	252	153	137	16	16	99	153							
2	Fortifikasi	Targeted	Surabaya	134	75					11	75	75	61	14	14	0	75	61	75	81,33%
			Kabupaten Kediri	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			Kabupaten Jember	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			TOTAL	134	75	0	0	0	11	75	75	61	14	14	0	75				
TOTAL PANGAN				919	225	0	0	0	31	225	132	116	16	16	93	132				
TOTAL				388	102	0	0	0	12	102	96	82	14	14	6	96				
TOTAL				1307	327	0	0	0	43	327	228	198	30	30	99	228				

2. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Januari			Februari			Maret		
			Rekomendasi*	TL**		Rekomendasi*	TL**		Rekomendasi*	TL**	
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	10	1		11	15		12	15	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	3	0		0	2		7	7	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		1	1		3	3	
		Pangan	10	4		8	7		42	47	
	Total	23	5	21,74	20	25	69,77	64	72	95,33	
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	1	1		2	2		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	3	3		1	1		2	2	
		Suplemen Kesehatan	1	1		0	0		1	1	
		Kosmetik	1	1		5	0		1	6	
		Pangan	0	0		0	0		0	0	
	Total	6	6	100,00	8	3	64,29	4	9	100,00	
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0		0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0		0	0	
		Pangan	0	0		0	0		0	0	
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		2	0		0	2	
		Pangan	2	2		2	0		0	2	
	Total	2	2	100,00	4	0	33,33	0	4	100,00	
TOTAL			31	13	73,91	32	28	55,80	68	85	98,44

3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Februari		Maret		Total		RAPK s.d TW I (Jan - Mar)		
			Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	15	3	15	12	31	32	32	31	103,2258065
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	2	0	7	0	9	0	0	9	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	1	0	3	2	4	3	3	4	75
		Pangan	7	4	43	11	54	21	21	54	38,89
	Total	25	7	68	25	98	56	56	98	57,14	
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Pangan	3	0	4	5	12	8	8	12	66,67
	Total	3	0	4	5	12	8	8	12	66,67	
TOTAL			28	7	72	30	110	64		61,90	

4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Januari			Februari			Maret			Total			RAPK s.d TW I (Jan - Mar)		
		Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	822	822	790	760	760	739	924	924	811	2506	2506	2340	2340	2506	93,38
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	726	726	726	608	608	608	762	762	746	2096	2096	2080	2080	2096	99,24
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	27	27	27	20	20	20	24	24	24	71	71	71	71	71	100,00
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	1	1	1	0	0	0	2	1	1	3	2	2	2	3	66,67
Total		1576	1576	1544	1388	1388	1367	1712	1711	1582	4676	4675	4493	4493	4676	96,09

5. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	Januari			Februari			Maret			Total			RAPK s.d. TW 1 (Jan - Mar)			
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Industri Farmasi (IF)	36	13	1	1	0	0	0	0	0	2	1	1	3	2	1			
2	Industri Bahan Baku Obat	27		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)		2	0			0			0									
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	15	7	0	0	0	2	2	0	2	0	2	4	2	2				
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (EBA) (Target gabung dengan IOT)	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	69	26	0	0	0	1	0	1	6	4	2	7	4	3				
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6	6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0				
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan (Target SK)	27	13	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0				
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi (Target gabung dengan IOT)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan (Masuk target SK)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	Industri Kosmetik	92	46	0	0	0	5	3	2	7	4	3	12	7	5				
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik (Masuk dalam target Industri Kosmetika)			0			0			0									
13	Industri Pangan	900	296	12	7	5	20	12	8	35	16	19	67	35	32				
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	28286	31	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7				
	Surabaya	29459	440	13	8	5	35	17	18	54	27	27	102	52	50	102	52	50	50,98

6. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI

No	Sarana Distribusi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	Januari			Februari			Maret			Total			RAPK s.d. TW 1 (Jan - Mar)			
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	296	80	8	7	1	6	5	1	8	5	3	22	17	5	22	17	5	
2	Apotek	3173	42	8	0	8	5	3	2	1	0	1	14	3	11	14	3	11	
3	Toko Obat	248	20	0	0	0	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4	
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)				1	1													
5	Rumah Sakit (RS)	28	28	2			1		0	3		1	2	6	3	3	6	3	3
6	Rumah Sakit (RS)	299	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Puskemas	677	52	1	1	0	6	6	0	2	1	1	9	8	1	9	8	1	
8	Klinik	824	51	0	0	0	1	0	1	4	2	2	5	2	3	5	2	3	
9	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kantor Kesehatan Pelabuhan												0	0	0	0	0	0	
11	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	677	150	8	6	2	6	2	4	7	2	5	21	10	11	21	10	11	
12	Fasilitas Distribusi suplemen kesehatan		95	0	0	0	2	2	0	3	2	1	5	4	1	5	4	1	
13	Fasilitas Distribusi Kosmetik	443	130	2	2	0	0	0	0	21	17	4	23	19	4	23	19	4	
14	Klinik Kecantikan (Penotifikasi dan Importir)		36	4			0	0	0	1	0	1	5	1	4	5	1	4	
15	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	1120	50	1	1	0	9	5	4	10	4	6	20	10	10	20	10	10	
	Surabaya	7785	774	34	19	15	38	24	14	62	34	28	134	77	57	134	77	57	57,46

7. PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d. tahun N	S.d Bulan (KUMULATIF)		
								Jan	Feb	Mar
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari	33	33		10	10
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	30%	Maret-April					
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40%	70%	Maret-Oktober					2,35
	4	Sertifikasi	20%	90%	September-November					
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan					
Total Progres								0	10	12,35
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	10%	Januari	9	9	10	10	10
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	50%	Februari-Maret					40
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-November				10,91	40
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Roreneku	10%	100%	November					
Total Progres								10	20,91	90
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	10	10	3,53	6,47	9,41
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei					
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September					
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-November					
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember					
Total Progres								3,53	6,47	9,41
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi						52	52	4,51	12,46	37,25

8. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN (98,07)

TOTAL RESPONDEN : 33					
Indeks Total			Indeks Kegiatan		
Average Values of	Skala 100	Skala 4	Average Values of	Skala 100	Skala 4
Ragam Kegiatan	98.23	3.93	Televisi	100	4
Pemahaman	96.34	3.85	Radio	100	4
Manfaat	99.24	3.97	Brosur, majalah, koran	96.88	3.88
Minat	97.73	3.91	Videotron / Billboard	100	4
Indeks	98.07	3.92	Transportasi Umum	100	4
			Bioskop	100	4
			Medio Online	96.43	3.86
			Talkshow Televisi	100	4
			Talkshow Radio	100	4
			CFD	95	3.8
			Pameran	95.83	3.83
			Penyuluhan	100	4
			Media Sosial	96.88	3.88
			Virtual	100	4

9. JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)		
					s.d Januari	s,d Februari	s.d Maret
1 Adokasi Lintas Sektor keamanan	20,00	Jan - April	76	76	0,00	3,33	10,00
2 Sosialisasi keamanan pangan	10,00	Maret - April			0,00	0,00	0,00
3 Bimbingan teknis keamanan	15,00	April - Juni			0,00	0,00	0,00
4 Pemberian Paket Edukasi/Produk	10,00	April - Nov			0,00	0,00	0,00
5 Monitoring Pemberdayaan Kader	15,00	Juli - Sept			0,00	0,00	0,00
- Pembentukan Tim Keamanan							
- Intervensi Keamanan Pangan							
6 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS	20,00	Agustus - Nov			0,00	0,00	0,00
7 Pengawasan	10,00	Okt - Des			0,00	0,00	0,00
Total skor (Tahun N)	100,00		76	76	0,00	3,33	10,00

10. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA) (%)		
					Januari	s.d Februari	sd Maret
1 Advokasi Kelembagaan Desa	20,00	Januari-April	28	28	0,00	3,33	10,00
2 Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5,00	TW1-TW2			0,00	0,00	0,00
3 Pelatihan Kader Keamanan Pangan	15,00	April-Juli			0,00	0,00	0,00
4 Bimtek Komunitas	15,00	Mei-Oktober			0,00	0,00	0,00
5 Fasilitas Keamanan Pangan	10,00	Juni-November			0,00	0,00	0,00
6 Intensifikasi Pengawasan Keamanan	10,00	e: Mei-Oktober- Post Nover			0,00	0,00	0,00
7 Monitoring dan Evaluasi (pertemuan	10,00	November-Desember			0,00	0,00	0,00
8 Lomba Desa Pangan Aman	5,00	Desember			0,00	0,00	0,00
9 Pengawasan	10,00	Juni-Desember			0,00	0,00	0,00
Total	100,00		28	28	0,00	3,33	10,00

11. JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)		
					Januari	s.d Februari	sd Maret
1 Advokasi	20,00	Januari-April	18	18	0,00	3,33	10,00
2 Survei Pasar	5,00	Januari-April			0,00	0,00	0,00
3 Bimtek Pengelola Pasar	15,00	April-Mei			0,00	0,00	0,00
4 Sampling dan Pengujian Tahap 1	15,00	April-Mei			0,00	0,00	0,00
5 Penyuluhan	10,00	Juni-Juli			0,00	0,00	0,00
6 Kampanye	10,00	Juni-Juli			0,00	0,00	0,00
7 Sampling dan Pengujian Tahap 2	15,00	September- Oktober			0,00	0,00	0,00
8 Pengawasan	10,00	Februari-Oktober			0,00	0,00	0,00
Total	100,00		18	18	0,00	3,33	10,00

12. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA SAMPEL OBAT DAN MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Bulan	Komoditi	Jumlah Sampel Selesai Uji	Tidak Memenuhi Timeline (maks 30 hari kerja)				Tidak Memenuhi Parameter Prioritas Sampling				% pemenuhan time line	% pemenuhan Parameter PS
			SBY	KDR	JBR	Balai/Loka Lain	SBY	KDR	JBR	Balai/Loka Lain		
Januari	Obat	3	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	
	Obat Tradisional	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Suplemen Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Kosmetik	14	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	
	Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
Februari	Obat	32	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	
	Obat Tradisional	32	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	
	Suplemen Kesehatan	4	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	
	Kosmetik	21	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	
	Pangan	82	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	
Maret	Obat	57	1	-	-	-	-	-	-	98,25%	100%	
	Obat Tradisional	24	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	
	Suplemen Kesehatan	12	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	
	Kosmetik	96	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	
	Pangan	141	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	

s.d Maret						
Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
2557	706	Benar	2557	294	Benar	19,55

s.d Maret						
Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
1106	299	Benar	1106	148	Benar	20,21

13. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KEBERHASILAN PENYIDIKAN

Tahapan	Maret										
	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
SPDP	11	3	3		1,00		0,15	15,00%	41,67%	42,86%	17,86%
Tahap I					0,00		0,50	13,33%			
P21				1	0,00		0,50	10,00%			
Tahap II				2	0,00		0,33	3,33%			
Total	11	3	3	3							

14. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI UPT YANG OPTIMAL

	TW I		
	Januari	Februari	Maret
total_akun_individu	136	134	141
total_akun_unit	1	1	1
total_individu_aktif	120	129	135
total_individu_login	120	129	135
total_unitbalai_aktif	1	1	1
Aspek Login (%)	26,47	28,88	28,72
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40	40	40
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	26,47	28,88	28,72
Perhitungan (%)	92,94	97,76	97,44
Perhitungan per TW	96,05		
Nilai Indeks	3		
Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOI			
	TW I		
	Januari	Februari	Maret
Aktifitas			
Akses BCC (%)	60	60	60
Login BCC (%)	40	40	40
Total	100	100	100
Perhitungan per TW	100		
Nilai Indeks Per TW	3		
Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM			
	TW I		
	Januari	Februari	Maret
Aktifitas			
Jumlah Akses	241	371	557
Perhitungan	389,67		
Nilai Indeks	3		
Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Sharing Folder			
	TW I		
	Januari	Februari	Maret
Aktifitas			
Jumlah Akses	241	371	557
Perhitungan	389,67		
Nilai Indeks	3		
Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Berita Aktual			
	TW I		
	Januari	Februari	Maret
Aktifitas			
Jumlah Upload		30	
Jumlah Viewer		8738	
Perhitungan Rata2 Berita		10	
Perhitungan Rata2 Pengunjung		291,27	
Indeks Per TW	3		
Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SPIMKER			
	TW I		
	Januari	Februari	Maret
Aktifitas			
Jumlah Entry	99	203	146
Jumlah Verifikasi	99	203	146
Perhitungan	100	100	100
Perhitungan per TW	100		
Nilai Indeks per TW	3		
Komposit SPIMKER (20%)	0,6		

Nilai Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi	
TW I	3
TW II	1,75
TW III	1,25
TW IV	1

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC	
TW I	1,4
TW II	0,4
TW III	0,2
TW IV	0,2

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	
TW I	2,2
TW II	1,075
TW III	0,725
TW IV	0,6

15. NILAI KINERJA ANGGARAN

SAMPAI DENGAN | JANUARI

CARI DI HALAMAN... Q

KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
			REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
432784	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	Nilai	100.00	100.00	87.12	100.00	100.00	25.00	100.00	46.55	49.14	70%	70.20
		Bobot	0	10	0	10	10	10	5	25			
		Nilai Akhir	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	2.50	5.00	11.64			
		Nilai Aspek	100.00		81.25					46.55			

SAMPAI DENGAN | FEBRUARI

CARI DI HALAMAN... Q

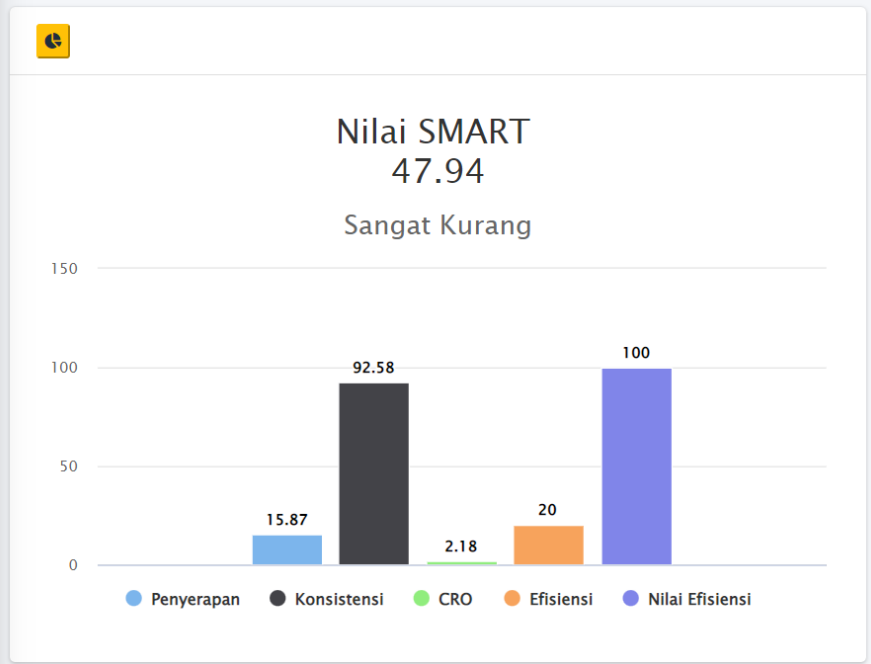
KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
			REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
432784	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	Nilai	100.00	100.00	87.12	100.00	100.00	100.00	100.00	65.61	61.40	70%	87.72
		Bobot	0	10	0	10	10	10	5	25			
		Nilai Akhir	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	5.00	16.40			
		Nilai Aspek	100.00		100.00					65.61			

SAMPAI DENGAN | MARET

CARI DI HALAMAN... Q

KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
			REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
432784	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	Nilai	100.00	100.00	87.12	100.00	100.00	99.75	100.00	86.30	66.55	70%	95.07
		Bobot	0	10	0	10	10	10	5	25			
		Nilai Akhir	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	9.97	5.00	21.58			
		Nilai Aspek	100.00		99.94					86.30			

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA



Nilai EKA tw 1, per 13 April 2022 = $47,94 \times 60\% = 28,76$

Nilai IKPA = $95,07 \times 40\% = 38,03$

Nilai Kinerja Anggaran = $28,76 + 38,03 = 66,79$